STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI YANG DISAJIKAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENDAGRI MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI

Dra. Marisi Parulian, M.Si

Karo Keuangan dan Aset

Sekretariat Jenderal

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII
BPSDM KEMENDAGRI

AGUSTUS - DESEMBER 2022

G20 INDONESIA 2022 RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi

OLEH:

Dra. Marisi Parulian, M.Si

Mentor	Peserta
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si	Dra. Marisi Parulian, M.Si
Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19640502 198702 1 005	NIP 197510171993112001

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi

OLEH:

Dra. Marisi Parulian, M.Si

Peserta

Dra. Marisi Parulian, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197510171993112001

Mentor

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19640502 198702 1 005

Coach

Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M.PSt
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19591029 198603 1 001

Penguji

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Pembina Utama IV/e)
NIP 19670429 198602 1 001

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Tlp. (021) 3524260, 348 30931, Fax. (021) 348 30931, *Web.*: www.kemendagri.go.id

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP	:	19640502 198702 1 005
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
Jabatan	:	Sekretaris Jenderal

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Nama	:	Dra. Marisi Parulian, M.Si
NIP	:	19751017 199311 2 001
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Biro Keuangan dan Aset

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benaranya untuk digunakan sebagaimanamestinya.

Jakarta, Oktober 2022

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Proyek Perubahan pada rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini, tentu saja tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri R.I, selaku atasan Mentor yang telah memberikan dukungan, komitmen dan motivasinya dalam penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini;
2. Bapak Dr.H. Suhajar Diantoro, M.Si, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Project Leader untuk mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan juga selaku Mentor yang mendukung dan memberikan arahan serta masukan untuk menyusun Rancangan Proyek Perubahan ini;
3. Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri selaku Penguji dan Narasumber pada agenda seminar laporan proyek perubahan atas dukungan dengan memberikan saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan penyusunan Proyek Perubahan ini;
4. Bapak Mohammad Rizal, S.E., M.Si selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVII;

5. Bapak Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M. Pst, selaku Coach PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan diskusi dalam menyusun Rancangan Proyek Perubahan ini;
6. Segenap Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat, serta semangat yang tak kenal lelah;
7. Suami saya Brigjen Pol. John C.E Nababan, S.Ik, SH, MH, anak-anakku Ezra Artha Ully Nababan, Irfa Wiyata Salomo Nababan dan Christian Immanuel Nababan yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian Rancangan Proyek Perubahan ini;
8. Para Kabag, Kasubag dan Staf Biro Keuangan dan Aset yang masuk dalam Tim Kerja, yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk sumbangsaran dan saling berkolaborasi dalam proses penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini.

Harapan kami, semoga Rancangan Proyek Perubahan ini dapat diterima dan selanjutnya dapat diimplementasikan guna memberikan pencerahan dan alternatif dalam upaya nyata pengembangan kompetensi guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan juga stakeholders.

Jakarta, Desember 2022

Penyusun,

Dra. Marisi Parulian, M.si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemendagri memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi akuntansi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kriteria yang digunakan dalam pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentunya harus memperhatikan terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan dan kriteria yang digunakan dalam pemberian opini. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri yaitu:

a. penyusun laporan keuangan belum memiliki kapasitas dan pengetahuan akuntansi yang cukup;
b. belum terdapat aplikasi yang mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian;
c. belum lengkapnya dokumen sumber untuk menyusun CaLK di tingkat kementerian;
d. penyampaian informasi CaLK secara berjenjang belum sepenuhnya dilaksanakan secara tepat waktu;
e. belum maksimalnya pelaksanaan SOP di berbagai jenjang unit akuntansi; dan
f. belum tersedianya anggaran untuk pembangunan media yang mengakomodir informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi tersebut, kami menyusun proyek perubahan dengan judul "**Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi**". Tujuan dari dilaksanakannya proyek perubahan ini adalah Pemahaman SDM yaitu operator satuan kerja lingkup Kemendagri dalam mengoperasikan media penyampaian informasi yaitu Aplikasi SIKAP-LK dan implementasi Aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022, keberlanjutan pengembangan SDM melalui Implementasi Aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited*, hingga tersedianya informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, dalam rangka pengungkapan yang memadai.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN iv
KATA PENGANTAR v
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xii
BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN 13
A. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 14
B. LATAR BELAKANG 15
C. TUJUAN DAN MANFAAT 25
D. OUTPUT DAN OUTCOME 25
E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 26
F. KERANGKA BERPIKIR TERKAIT KONDISI DAN SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH 32
G. RENCANA STRATEGI MARKETING 33
H. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA 40
I. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 42
J. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN 44
K. KETERKAITAN DENGAN AGENDA PEMBELAJARAN 46
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 49
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS 50
B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING 64
C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR 76
BAB III PENUTUP 80
A. LESSON LEARNT 81
B. KESIMPULAN 83
C. SARAN 85
BAB IV PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 86
DAFTAR PUSTAKA 94
DAFTAR RIWAYAT 95
LAMPIRAN 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kerangka Fishbone Penyebab Masalah 23

Gambar II. 1 Koordinasi Revisi Anggaran untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset 51
Gambar II. 2 Rapat bersama Tim Efektif 53
Gambar II. 3 Surat Keputusan pembentukan tim efektif 54
Gambar II. 4 Rapat koordinasi dengan pihak ketiga pengembang Aplikasi SIKAP-LK 55
Gambar II. 5 Rapat bersama Pusat Data dan Informasi terkait Penempatan Server Aplikasi SIKAP-LK 55
Gambar II. 6 Kegiatan Uji Coba Aplikasi SIKAP-LK 57
Gambar II. 7 Cover Laporan Keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022 57
Gambar II. 8 Halaman Muka Aplikasi SIKAP-LK setelah Tahap Penyempurnaan 58
Gambar II. 9 Penyusunan Buku Panduan Aplikasi SIKAP-LK 59
Gambar II. 10 Buku Panduan Aplikasi SIKAP-LK 59
Gambar II. 11 Halaman Muka Perbaikan SOP Penyusunan Laporan Keuangan Kemendagri 61
Gambar II. 12 Potongan Isi Perbaikan SOP Penyusunan Laporan Keuangan Kemendagri 62
Gambar II. 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 tentang Pengungkapan Informasi pada CaLK Kemendagri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi 62
Gambar II. 14 Sosialisasi dan coaching Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang “Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan” kepada komponen lingkup Kemendagri 64

Gambar II. 15 Permintaan Persetujuan dan Dukungan Bapak Sekretaris Jenderal.....67
Gambar II. 16 Persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal tentang Proyek Perubahan 67
Gambar II. 17 Berkonsultasi dengan Coach untuk mendapat persetujuan proyek perubahan.....68
Gambar II. 18 Bukti Persetujuan Coach terhadap Proyek Perubahan 69
Gambar II. 19 Rapat bersama Tim Efektif.....70
Gambar II. 20 Surat Perintah Kerja (SPK) PT Fayirezka Arta Mustari.....71
Gambar II. 21 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pembangunan Aplikasi SIKAP-LK.....72
Gambar II. 22 Pernyataan Dukungan dari Kepala Bagian Keuangan lingkup Kemendagri.....73
Gambar II. 23 Pernyataan Dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan 74
Gambar II. 24 Pernyataan Dukungan dari Kementerian Keuangan.....75
Gambar II. 25 Publikasi Proyek Perubahan pada Website Kemendagri 76

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Alat Tapis APKL 21
Tabel I. 2 Alat Tapis USG 22
Tabel I. 3 Penjelasan Kerangka Fishbone 24
Tabel I. 4 Tahapan Perubahan Rencana Strategis 31
Tabel I. 5 Kerangka Berpikir Kondisi dan Penyelesaian Masalah 33
Tabel I. 6 Pemetaan Stakeholder 39
Tabel I. 7 Kuadran Stakeholder 39
Tabel I. 8 Identifikasi Potensi Masalah dan Solusi 42
Tabel I. 9 Faktor Kunci Keberhasilan 44
Tabel I. 10 Kaitan dengan Pembelajaran 48

Tabel II. 1 Tahapan Kegiatan Revisi Anggaran untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset 50
Tabel II. 2 Tahapan Kegiatan Pemaparan Rencana Proyek Perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal 52
Tabel II. 3 Tahapan Kegiatan Pembentukan Tim Efektif 53
Tabel II. 4 Perancangan dan pembangunan Aplikasi SIKAP-LK 55
Tabel II. 5 Tahap Kegiatan Uji Coba Aplikasi SIKAP-LK 56
Tabel II. 6 Tahap Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK 58
Tabel II. 7 Tahap Kegiatan Penyusunan Buku Panduan SIKAP-LK 59
Tabel II. 8 Tahapan Kegiatan Penyusunan Kepmendagri Pengungkapan Informasi pada CaLK dengan Memanfaatkan TI 61
Tabel II. 9 Tahapan Kegiatan Sosialisasi dan coaching Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang “Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan” kepada komponen lingkup Kemendagri 63
Tabel II. 10 Identifikasi Stakeholders 66

Tabel III. 1 Rencana Potensi Pengembangan Diri 87

BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Kemendagri menghadapi permasalahan dalam menghimpun informasi yang digunakan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka memenuhi salah satu kriteria dalam pemberian opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan, yaitu kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Permasalahan tersebut antara lain disebabkan keterbatasan informasi dalam CaLK tingkat UAPPA-E1 sebagai dampak dari terbatasnya waktu penyusunan Laporan Keuangan terutama periode penyusunan *Audited,* belum terdapat aplikasi yang mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian serta dokumen sumber sebagai pendukung pengungkapan dan penyajian Laporan Keuangan tingkat Kementerian berada pada Satker.

Selain itu terdapat permasalahan ketidakseragaman pengungkapan Laporan Keuangan pada berbagai jenjang unit akuntansi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengaturan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tidak dapat terpenuhi karena informasi yang disajikan pada CaLK tingkat Kementerian tidak didukung dengan informasi yang disajikan pada CaLK tingkat UAKPA dan UAPPA-E1.

Penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan suatu media yang dapat digunakan secara bersamaan oleh setiap jenjang unit akuntansi dalam penyusunan CaLK. Selain itu, media tersebut juga diharapkan dapat menghimpun informasi dengan cepat dan lengkap serta menghimpun seluruh dokumen sumber yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan inovasi dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pengungkapan atas Laporan Keuangan (SIKAP-LK).

Selain menyediakan media untuk menghimpun informasi dalam penyusunan CaLK, dibutuhkan komitmen untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan. Aplikasi

SIKAP-LK akan disosialisasikan dan disebarkan secara intensif melalui bimbingan teknis agar penyusun laporan dapat memanfaatkan media ini secara maksimal.

B. LATAR BELAKANG

B.1. GAMBARAN UMUM

Biro Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara. Tugas ini termasuk di antaranya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan akuntansi, perhitungan anggaran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan serta penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan keuangan dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKKL berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4884 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 memuat di antaranya Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal. Salah satunya indikator yakni "Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri" dengan target "Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" di mana Biro Keuangan dan Aset sebagai unit kerja penanggungjawab.

LKKL disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP yang disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan agar PSAP dapat dipahami dengan lebih baik. Penerapan SAP berbasis akrual merujuk pada Lampiran I Peraturan Pemerintah dimaksud dan perubahan terhadap PSAP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan.

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, mewajibkan LKKL disusun dan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat Kementerian. Pada setiap jenjang

dibentuk unit akuntansi yang bertugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna AnggaranWilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA). UAKPA menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada jenjang unit akuntansi di atasnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan, dan seterusnya sampai dengan laporan keuangan pada tingkat UAPA. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, UAPA memproses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, maka seluruh Kementerian Negara/Lembaga menerapkan sistem SAKTI mulai Tahun Anggaran 2022. Sistem tersebut mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN. Penerapan SAKTI pada tingkat satker dilakukan melalui input data pada sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Selanjutnya, SAKTI melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat Kementerian yang menghasilkan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Pengintegrasian sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SAKTI dilengkapi dengan MONSAKTI yang berfungsi sebagai pengendalian dalam pengoperasian aplikasi SAKTI. Data yang terintegrasi

pada aplikasi SAKTI menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA dan konsolidasi laporan keuangan unit akuntansi diatasnya. Namun, sebagai bahan penyusunan CaLK, data yang dihasilkan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemilik transaksi yang berada pada satker. Dalam rangka menghasilkan CaLK yang informatif, keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu kendala karena memerlukan waktu tambahan untuk menghimpun informasi dari seluruh satker. Hal ini terbukti dari rekomendasi koreksi audit yang disampaikan auditor BPK atas penyajian CaLK pada laporan keuangan unaudited dalam setiap periode pemeriksaan. Rekomendasi tersebut berisi informasi yang dibutuhkan dan menjadi panduan auditee untuk perbaikan kualitas pengungkapan.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, penyampaian LKKL untuk periode Semester I dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan tahunan, Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk menyusun laporan keuangan untuk periode Triwulan III yang disertai dengan CaLK.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, CaLK disajikan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan yang dilaporkan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, terdapat pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan. Penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan serta pengungkapan yang diatur dalam Buletin Teknis SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Sistematika penyajian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga memberikan ilustrasi laporan keuangan pada berbagai jenjang unit akuntansi yang dapat menjadi pedoman minimal dalam pengungkapan informasi yang harus ada pada laporan keuangan. Hal ini memberikan kemudahan dalam penyusun laporan keuangan di berbagai jenjang unit akuntansi.

Melihat regulasi yang terus berkembang, muncul tantangan untuk terus mengimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang optimal. Hengki Permdi, dkk dalam Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016 berjudul "Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor)" membagikan kuesioner kepada petugas operator aplikasi laporan keuangan kementerian. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 1 s.d. 2 orang dari 10 orang petugas yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan demikian, masih diperlukan adanya transfer pengetahuan kepada operator lain dengan latar belakang pendidikan yang lebih beragam. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai potensi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

B.2. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari kondisi organisasi saat ini, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, namun demikian

penyusunan Laporan Keuangan belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian;
2. Rendahnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian;
3. Tidak ditaatinya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan; dan
4. Keterbatasan waktu pengungkapan CaLK.

B.3. HARAPAN DI MASA DEPAN

Langkah mitigasi atas kendala yang menjadi hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan menjadi upaya dalam mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas penyajian atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian;
2. Tingginya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya
3. Taatnya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan; dan
4. Pengungkapan CaLK dapat disajikan secara lengkap dengan batas waktu yang diberikan.

B.4. MASALAH PRIORITAS YANG AKAN DIPECAHKAN

Dalam menyusun Laporan Keuangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Terhadap kendala tersebut, kami merumuskan level prioritas masalah dengan beberapa alat tapis sebagai berikut:

B.4.1 Alat Tapis APKL

Perumusan level prioritas masalah dapat digunakan dengan mengukur tingkat aktual, problematik, khalayak/orang banyak, dan layak/realistis (APKL). Tabel berikut merupakan pemeringkatan prioritas berdasarkan indikator APKL yang disajikan pada Tabel B.1. Berdasarkan tabel tersebut, masalah “Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang

diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian" mendapatkan skor paling besar dibandingkan dua permasalahan lainnya.

Peringkat	Masalah	A	P	K	L	Total
1.	Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian	3	3	3	3	12
2.	Rendahnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian	3	3	2	2	10
3.	Tidak ditaatinya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan	3	3	1	1	8
4.	Keterbatasan waktu pengungkapan CaLK	3	2	1	1	7

Tabel I. 1 Alat Tapis APKL

Keterangan:

Angka 1 : tidak mendesak/gawat dan berdampak

Angka 2 : cukup mendesak/gawat dan berdampak

Angka 3 : mendesak/gawat dan berdampak

B.4.2 Alat Tapis USG

Setelah menentukan prioritas masalah menggunakan Alat Tapis APKL, kami memilih tiga masalah dengan skor tertinggi untuk diurutkan kembali menggunakan alat tapis USG yaitu:

a. *Urgency*: Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia;
b. *Seriousness*: Seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul; dan
c. *Growth*: Seberapa besar perkembangan isu tersebut apabila dibiarkan.

Pemeringkatan masalah berdasarkan alat tapis USG disajikan pada Tabel B.2. Berdasarkan tabel tersebut, masalah "Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian" mendapatkan skor paling besar dibandingkan dua permasalahan lainnya.

Pering -kat	**Masalah**	**U**	**S**	**G**	**Total**
1.	Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian	3	3	3	9
2.	Rendahnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian	3	2	1	6
3	Tidak ditaatinya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan	3	2	2	7

Tabel I. 2 Alat Tapis USG

Keterangan:

Angka 1 : tidak penting

Angka 2 : netral

Angka 3 : penting

Berdasarkan pemeringkatan masalah sebagaimana Poin B.4.1 dan B.4.2, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berupa informasi pada CaLK yang disampaikan unit akuntansi di bawahnya belum lengkap, dan terdapat ketidakseragaman informasi pada CaLK di berbagai jenjang unit akuntansi merupakan permasalahan yang paling prioritas sehingga perlu dirumuskan penyelesaiannya.

B.5. PENYEBAB MASALAH

Dalam menyusun Laporan Keuangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Terhadap kendala tersebut, kami merumuskan level prioritas masalah dengan menggunakan kerangka *fishbone* sebagaimana dijabarkan pada Gambar B.1 dan Tabel B.3.

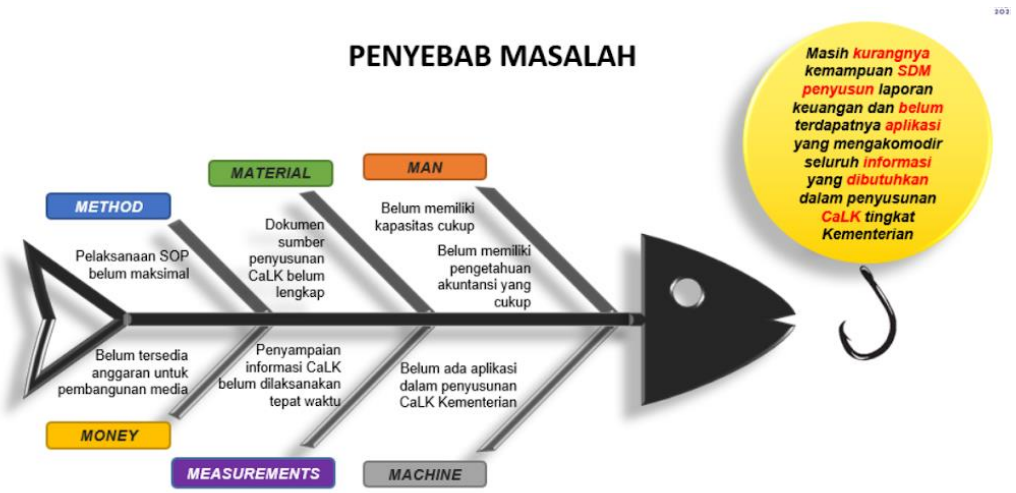

Gambar I. 1 Kerangka Fishbone Penyebab Masalah

Peringkat	Penyebab Masalah	Solusi
1	*Man*: penyusun laporan keuangan belum memiliki kapasitas dan pengetahuan akuntansi yang cukup	- diselenggarakan bimbingan teknis secara berkelanjutan - penempatan SDM lulusan PKN STAN disesuaikan dengan MoU antara

Peringkat	Penyebab Masalah	Solusi
		KemenpanRB, Kemenkeu, dan Kemendagri.
2	*Machine*: belum terdapat aplikasi yang mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian	proses penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang melalui aplikasi sebagai media komunikasi untuk memperoleh informasi dan dokumen sumber
3	*Material*: belum lengkapnya dokumen sumber untuk menyusun CaLK di tingkat kementerian	dibutuhkan media untuk menghimpun dokumen sumber dari masing-masing satuan kerja
4	*Measurement*: penyampaian informasi CaLK secara berjenjang belum sepenuhnya dilaksanakan secara tepat waktu	meningkatkan koordinasi agar penyampaian CaLK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
5	*Method*: belum maksimalnya pelaksanaan SOP di berbagai jenjang unit akuntansi	dibutuhkan pengawasan dan pengendalian secara berkala dari atasan langsung
6	*Money:* belum tersedianya anggaran untuk pembangunan media yang mengakomodir informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian	Penyesuaian alokasi anggaran melalui Revisi DIPA

Tabel I. 3 Penjelasan Kerangka Fishbone

Berdasarkan pemeringkatan penyebab permasalahan tersebut, kami memilih untuk memitigasi penyebab masalah berupa masih kurangnya kemampuan SDM penyusun laporan keuangan dan belum

terdapatnya aplikasi yang mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian dengan merumuskan strategi pengungkapan informasi dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan melalui Aplikasi SIKAP-LK.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari inovasi ini disusun antara lain:

1. Jangka pendek: Pemahaman SDM yaitu operator satuan kerja lingkup Kemendagri dalam mengoperasikan Aplikasi SIKAP-LK dan implementasi Aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022
2. Jangka menengah: diharapkan adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui Implementasi Aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited*
3. Jangka panjang: tersedianya informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

   Sementara itu, manfaat dari dibangunnya inovasi ini adalah tersedianya informasi yg cukup dalam rangka pengungkapan yang memadai pada CaLK.

D. OUTPUT DAN OUTCOME

Output dari inovasi ini berupa produk akhir yaitu peningkatan kapasitas SDM dan tersedianya aplikasi SIKAP-LK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang “Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan” sedangkan *outcome* dari inovasi ini adalah terwujudnya CaLK yang lebih informatif dalam memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan.

E. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Penyusunan inovasi ini terbagi dalam beberapa tahap yakni sebagai berikut:

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
Jangka Pendek					
1	Revisi Anggaran untuk optimalisasi tata kelola keuangan dan aset	1. Menyusun undangan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset 2. Melaksanakan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset 3. Koordinasi dengan Biro Perencanaan	Oktober 2022	1. Undangan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset 2. Laporan hasil rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset 3. DIPA hasil revisi	1. Terlaksananya koordinasi terkait revisi anggaran lingkup Biro Keuangan dan Aset 2. Tercapainya kesepakatan dengan para bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset terkait usulan revisi anggaran 3. Masukan dari Biro Perencanaan terkait usulan revisi anggaran
2	Memaparkan Rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor	1. Menghadap Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor 2. Melaporkan rencana dan progres proyek kepada Bapak Sekretaris Jenderal secara berkala	M4 September s.d. M1 Desember 2022	1. Paparan proyek perubahan 2. Penandatangan Berita Acara persetujuan dan kemajuan pelaksanaan tahapan oleh Bapak Sekretaris Jenderal	1. Informasi terkait proyek perubahan tersampaikan kepada mentor 2. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan disetujui oleh mentor

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
3	Pembentukan Tim Efektif	1. Menyusun undangan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset 2. Mengadakan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset tentang penyusunan tim efektif 3. Menyusun SK Tim Efektif 4. Tim Efektif melaksanakan tugas sesuai dengan peran yang ditetapkan	M4 September, November, Desember 2022	1. Undangan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset 2. Laporan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset tentang penyusunan tim efektif 3. SK Tim efektif 4. Dokumentasi pelaksanan tugas oleh tim efektif	1. Terlaksananya rapat melaksanakan rapat tentang pembentukan tim efektif 2. Terciptanya kesepakatan tentang pembentukan tim efektif 3. Terbentuknya susunan tim efektif 4. Terlaksananya tugas dan peran masing-masing anggota tim efektif
4	Perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembangun aplikasi 2. Mengadakan rapat tentang perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK dalam rangka percepatan penghimpunan kelengkapan dokumen sumber untuk menyusun CaLK di tingkat Kementerian	M3 September s.d. M1 November 2022	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembangun aplikasi 2. Laporan rapat tentang perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK	1. Terlaksananya rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembangun aplikasi 2. Terciptanya kesepakatan tentang perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
		3. Memantau progres penyusunan design aplikasi		3. Design aplikasi SIKAP-LK	3. Tergambarkannya *flow process* aplikasi SIKAP-LK
5	Uji coba Aplikasi SIKAP-LK	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri 2. Mengadakan rapat tentang uji coba aplikasi SIKAP-LK 3. Melaksanakan koordinasi penyampaian CaLK tepat waktu 4. Menyusun laporan keuangan Kemendagri dengan implementasi Aplikasi SIKAP-LK	M4 Oktober 2022	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri 2. Laporan dan dokumentasi rapat tentang uji coba aplikasi SIKAP-LK 3. Laporan Keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022 4. Foto kegiatan penyusunan laporan keuangan dan implementasi aplikasi SIKAP-LK	1. Terlaksananya rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri 2. Terinfokannya aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri untuk dilaksanakan pada penyusunan Laporan Keuangan triwulan III 3. Tersampaikannya Laporan Keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022 tepat waktu 4. Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan III dan meningkatnya pemahaman operator (SDM) terkait penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIKAP-LK

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
6	Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Mengadakan rapat tentang penyempurnaan aplikasi SIKAP-LK	M1 s.d. M2 November 2022	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Aplikasi SIKAP-LK hasil penyempurnaan	1. Terlaksananya Rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Perbaikan fitur aplikasi SIKAP-LK
7	Penyusunan buku panduan (*manual book*) aplikasi SIKAP-LK	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Mengadakan rapat tentang penyusunan buku panduan aplikasi SIKAP-LK	M1 s.d. M2 November 2022	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Buku panduan SIKAP-LK	1. Terlaksananya rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK 2. Tersusunnya panduan aplikasi SIKAP-LK
8	Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan biro hukum 2. Mengadakan rapat tentang penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri 3. Perbaikan SOP penyusunan Laporan Keuangan	M4 November	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan biro hukum 2. Draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri 3. SOP penyusunan Laporan Keuangan yang telah diperbarui	1. Terlaksananya rapat antara tim efektif dengan biro hukum 2. Tersusunnya Draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri 3. Penyampaian usulan SOP penyusunan Laporan Keuangan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
		4. Pembahasan draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"		4. Draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"	4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" di lingkungan Kemendagri ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
		5. Menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri kepada komponen lingkup Kemendagri		5. Surat kepada komponen terkait penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada komponen lingkup Kemendagri	5. Tersampaikan nya Keputusan Menteri Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri kepada komponen lingkup Kemendagri
9	Sosialisasi dan *coaching* Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri	1. Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri	M4 November	1. Undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri	1. Kesepakatan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri
		2. Menyusun video singkat tentang penerapan aplikasi SIKAP-LK		2. Video singkat tentang penerapan aplikasi SIKAP-LK	2. Tergambarkan nya alur aplikasi SIKAP-LK
		3. Mengadakan rapat tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri		3. Laporan rapat tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri	3. Tersampaikan nya alur aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri

No	Tahapan/Kegiatan		Waktu	Output/fisik	Hasil
		4. Mengadakan *coaching* kepada operator (SDM) lingkup Kemendagri mengenai pengoperasian aplikasi SIKAP-LK		4. Dokumentasi kegiatan *coaching* kepada operator (SDM) lingkup Kemendagri mengenai pengoperasian aplikasi SIKAP-LK	4. Meningkatnya pemahaman operator (SDM) lingkup Kemendagri mengenai pengoperasian aplikasi SIKAP-LK
Jangka Menengah					
1	Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan kapasitas penyusunan laporan keuangan	Asistensi dari Biro Keuangan dan Aset	M3 Maret 2023	Dokumentasi undangan dan foto	1. Terlaksananya Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan kapasitas penyusunan laporan keuangan 2. penyusunan Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022 *Unaudited* dapat menggunakan Aplikasi SIKAP-LK
Jangka Panjang					
1	Pembahasan dengan komponen lingkup Kemendagri terkait perbaikan Laporan Keuangan *Unaudited*	Rapat Biro Keuangan dan Aset dengan komponen lingkup Kemendagri	M1 April s.d. M4 Mei 2023	Undangan rapat, dokumentasi rapat, Berita Acara Rapat	Terlaksananya pembahasan dan perbaikan data laporan keuangan hasil koreksi BPK
2	Pembahasan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited*	Rapat antara Kemendagri dengan Kementerian Keuangan dan BPK	M1 April s.d. M4 Mei 2023	Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022	Tersedianya informasi atas laporan keuangan Kemendagri Tahun 2022 yang memadai

Tabel I. 4 Tahapan Perubahan Rencana Strategis

F. KERANGKA BERPIKIR TERKAIT KONDISI DAN SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

Berdasarkan huruf A s.d. huruf E, kondisi saat ini, penyelesaian masalah, dan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dapat dipetakan melalui kerangka berpikir sebagai berikut:

KONDISI SAAT INI	SOLUSI INOVATIF	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
1. Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian 2. Rendahnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian 3. Tidak ditaatinya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan 4. Keterbatasan waktu pengungkapan CaLK	<u>Jangka Pendek</u> 1. Revisi Anggaran untuk optimalisasi tata kelola keuangan dan aset 2. Memaparkan Rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor 3. Pembentukan Tim Efektif 4. Perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK 5. Uji coba Aplikasi SIKAP-LK 6. Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK 7. Penyusunan buku panduan (*manual book*) aplikasi SIKAP-LK 8. Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri dan perbaikan SOP penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri 9. Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri <u>Jangka Menengah</u> Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan kapasitas penyusunan laporan keuangan <u>Jangka Panjang</u> 1. Pembahasan dengan komponen lingkup Kemendagri terkait perbaikan Laporan Keuangan *Unaudited*	<u>Jangka Pendek</u> 1. Lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian; 2. Tingginya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya 3. Taatnya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan; dan 4. Pengungkapan CaLK dapat disajikan secara lengkap dengan batas waktu yang diberikan. <u>Jangka Menengah</u> Meningkatnya kualitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan <u>Jangka Panjang</u> Meningkatnya kualitas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

KONDISI SAAT INI	SOLUSI INOVATIF	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
	2. Pembahasan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited	

Tabel I. 5 Kerangka Berpikir Kondisi dan Penyelesaian Masalah

G. RENCANA STRATEGI MARKETING

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian, Biro Keuangan dan Aset menghadapi beberapa kendala dalam penyusunan CaLK, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidaklengkapan informasi dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian
   a. Keterbatasan informasi yang diungkapkan dalam CaLK tingkat UAPPA-E1 (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna AnggaranEselon I)

      Informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA belum dapat mendukung kebutuhan informasi dalam menyusun CaLK tingkat Kementerian. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

      1) Pengungkapan laporan keuangan tingkat Kementerian, baik substansi informasi maupun format penyajiannya mengalami perkembangan berdasarkan rekomendasi auditor BPK RI dalam pemeriksaan atas laporan keuangan. Rekomendasi auditor BPK RI atas koreksi CaLK ditujukan hanya pada CaLK yang disusun pada tingkat UAPA karena laporan keuangan yang diberikan opini adalah laporan keuangan tingkat Kementerian. Mengingat terbatasnya waktu penyusunan laporan keuangan untuk periode *audited* menyebabkan penyusun laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 belum terinformasikan dan belum memahami perkembangan tambahan informasi yang perlu diungkapkan pada CaLK.

Selanjutnya, koreksi audit CaLK tingkat UAPA didasarkan pada dokumen sumber dan/atau rekomendasi narasi auditor BPK RI.

2) Hasil konsolidasi laporan keuangan beberapa satker dapat menyebabkan pengungkapan menjadi bias, sehingga substansi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat Kementerian tidak dapat diperoleh, atau terdapat informasi penting yang perlu diungkapkan pada CaLK, namun tidak disajikan pada CaLK tingkat UAPPA-E1. Misalnya CaLK satker menyajikan daftar rincian NTPN yang berasal dari bukti setor ke Kas Negara atas pengembalian uang persediaan yang disetor setelah tanggal neraca per 31 Desember. Namun pada CaLK tingkat UAPPA-E1 tidak terdapat daftar rincian NTPN dimaksud yang dapat disebabkan terlalu banyaknya rincian NTPN yang berasal dari satker-satker yang berada dibawah kewenangannya.

b. Keterbatasan informasi yang dihasilkan aplikasi yang tersedia untuk penyusunan CaLK

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SAKTI sebagai sistem yang terintegrasi diperuntukan menghasilkan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dalam rangka mendukung validitas data pada komponen laporan keuangan dimaksud, pelaksanaan SAKTI didukung oleh pengelolaan monitoring data dan transaksi SAKTI melalui aplikasi MonSAKTI. Dengan demikian informasi lain yang dihasilkan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI belum mengakomodir seluruh kebutuhan informasi yang digunakan dalam pengungkapan pada CaLK.

c. Kebutuhan dokumen sumber untuk mendukung penyajian laporan keuangan

Terdapat beberapa dokumen sumber yang dibutuhkan UAPA untuk mendukung pengungkapan pada beberapa saldo akun yang dsajikan pada laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa satker telah melaksanakan pengendalian intern yang memadai. Dokumen sumber yang dibutuhkan untuk mendukung penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sering menjadi pertanyaan Tim Reviu dan Auditor BPK RI kepada UAPA, antara lain:

1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan neraca didukung dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi, serta terhadap penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran perlu didukung bukti setor ke Kas Negara setelah tanggal neraca;
2) penyajian saldo persediaan pada neraca untuk periode pelaporan Semester I dan Tahunan perlu didukung dengan berita acara opname fisik persediaan;
3) Beberapa penjelasan mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya, terutama terkait dengan transaksi penghapusan, dan hibah perlu didukung dokumen sumber.

2. Ketidakseragaman pengungkapan laporan keuangan pada berbagai jenjang unit akuntansi

Ketentuan yang berlaku mengatur LKKL disusun dan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang disajikan pada laporan keuangan pada tingkat UAPA didukung secara berjenjang oleh informasi yang disajikan pada laporan keuangan unit akuntansi dibawahnya. Permasalahan ketidakseragaman pengungkapan dapat berupa saldo akun-akun pada laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 yang tidak dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil analisa atau dokumen sumber. Sebagai

contoh kenaikan/penurunan persentase realisasi belanja dibandingkan periode pelaporan sebelumnya tidak dijelaskan pada CaLK tingkat UAPPA-E1, namun CaLK UAPA menjelaskan kenaikan/penurunan tersebut berdasarkan hasil analisa dan konfirmasi dengan satker terkait. Contoh lain misalnya Aset Tetap berupa Tanah yang berada dibawah penguasaan pihak lain telah diungkapkan pada CaLK UAPA berdasarkan dokumen sumber dan/atau rekomendasi koreksi CaLK dari auditor BPK RI. Permasalahan aset tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut karena dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, namun CaLK tingkat UAPPA-E1 atau UAKPA tidak mengungkapkan permasalahan aset tersebut.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengaturan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tidak dapat terpenuhi karena informasi yang disajikan pada CaLK tingkat kementerian tidak didukung dengan informasi yang disajikan pada CaLK tingkat UAKPA dan UAPPA-E1.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penyusunan CaLK dimaksud dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif, sebagai berikut:

1. Inovasi dalam bentuk pengembangan aplikasi SIKAP-LK untuk menghimpun informasi dari satker dalam penyusunan CaLK untuk memenuhi kecukupan pengungkapan dan keseragaman penyajian informasi;
2. Meningkatkan koordinasi secara manual dalam penyusunan CaLK melalui rapat atau media komunikasi lainnya.

Dalam penyusunan CaLK agar informasi yang diperoleh memenuhi kecukupan pengungkapan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Kemendagri serta keseragaman informasi yang disajikan pada laporan keuangan di berbagai jenjang unit akuntansi, maka dibutuhkan aplikasi sebagai media komunikasi informasi dan penyampaian dokumen sumber dari UAKPA kepada UAPPA-E1 dan UAPA.

Inovasi pengembangan aplikasi dimaksud memungkinkan UAKPA untuk menyampaikan informasi dan dokumen sumber yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK tingkat UAPPA-E1 dan UAPA. Manfaat dari aplikasi ini dapat mempersingkat waktu penyusunan CaLK tingkat UAPA jika dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan melalui mekanisme penyampaian berjenjang. Selain itu, aplikasi ini menghasilkan keseragaman informasi di antara CaLK berbagai jenjang unit akuntansi.

Mengingat pentingnya manfaat dari aplikasi yang akan dikembangkan berupa kelengkapan dan keseragaman informasi dalam penyusunan CaLK, maka perlu didukung oleh *stakeholders* di Lingkungan Kemendagri dalam bentuk strategi marketing.

Selanjutnya strategi marketing dalam proyek perubahan ini menerapkan dua pendekatan yaitu strategi marketing selama proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing hasil proyek perubahan. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan marketing proyek perubahan dengan cara menjalin kolaborasi yang optimal dengan *stakeholders*.

Strategi marketing yang diterapkan selama proses penyusunan proyek perubahan dirumuskan dengan mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders*. Hasil dari identifikasi dan peta *stakeholders* akan menentukan strategi agar *stakeholders* dapat mendukung proyek perubahan. Tabel G.1 merupakan pemetaan *stakeholders*.

No.	***Stakeholders***	**Pengaruh**	**Kepentingan**	***Analisis Stakeholders***
1.	Bapak Sekretaris Jenderal	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
2.	Kepala Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*

No.	*Stakeholders*	Pengaruh	Kepentingan	*Analisis Stakeholders*
3.	Kepala Sub Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
4.	Tim IT pengembang aplikasi	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
5.	Staf pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
6.	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Tinggi	Rendah	*Latents*
7.	Badan Pemeriksa Keuangan	Tinggi	Rendah	*Latents*
8.	Satuan kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri	Tinggi	Rendah	*Latents*
9.	Seluruh staf pada Biro Keuangan dan Aset	Rendah	Tinggi	*Defenders*
10.	Website Kemendagri sesuai Undang Undang Nomor 14	Rendah	Rendah	*Apathetics*

No.	*Stakeholders*	Pengaruh	Kepentingan	*Analisis Stakeholders*
	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 9			

Tabel I. 6 Pemetaan Stakeholder

Sumbu horizontal: tingkat kepentingan →		Sumbu vertikal: tingkat pengaruh ↓
Latents: 1. Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan DJPb Kemenkeu 2. Badan Pemeriksa Keuangan 3. Satker	**Promoters:** 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset 3. Kepala Sub Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset 4. Tim IT pengembang aplikasi 5. Staf pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan dan Aset	
Apathetics Website Kemendagri sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 9	**Defenders** Seluruh staf lingkup Biro Keuangan dan Aset	

Tabel I. 7 Kuadran Stakeholder

Sementara itu, pendekatan strategi marketing hasil proyek perubahan disusun dengan metode strategi *marketing mix* yakni sebagai berikut:

1. *Product*: Aplikasi SIKAP-LK untuk membantu mengakomodir seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk pengungkapan pada CaLK.
2. *Place*: Aplikasi diharapkan dapat menjangkau komponen kerja lingkup Kemendagri
3. *Promotion*: menyusun strategi komunikasi dengan *stakeholder* antara lain:
   a. Kepala Bagian Keuangan dari masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai perwakilan dari komponen kerja Kemendagri yang menggunakan aplikasi untuk menyediakan informasi atas Laporan Keuangan;
   b. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai Pembina Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; dan
   c. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemeriksa Laporan Keuangan

H. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Kendala yang dihadapi pada implementasi inovasi ini dan perumusan solusi penyelesaiannya disajikan pada Tabel H.1.

No.	Tahapan	Potensi Masalah	Solusi
1	Revisi Anggaran untuk optimalisasi tata kelola keuangan dan aset	Proses revisi anggaran terhambat sehingga mempengaruhi rencana penarikan dana untuk pembayaran biaya aplikasi SIKAP-LK	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait kendala revisi dan memantau progres revisi secara berkala
2	Memaparkan Rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor	Kendala menyesuaikan jadwal pertemuan dengan Bapak Sekretaris Jenderal dikarenakan padatnya jadwal kegiatan pimpinan	Melakukan koordinasi untuk menyesuaikan dengan jadwal pimpinan
3	Pembentukan Tim Efektif	Anggota tim hanya bekerja sesuai tugas yang tertuang	Perlu peran aktif koordinator untuk mengatur peran dan tugas

No.	Tahapan	Potensi Masalah	Solusi
		dalam SK Tim sehingga apabila ada anggota tim yang berhalangan, akan terganggu proses secara keseluruhan	anggota secara fleksibel
4	Perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK	1. Waktu pengerjaan aplikasi lebih lama dibandingkan *timeline* yang sudah direncanakan 2. Biaya pembangunan lebih besar dari yang dianggarkan	1. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja secara berkala agar dapat selesai tepat waktu 2. Mengurangi fitur dalam aplikasi untuk dipergunakan kembali pada saat pengembangan aplikasi
5	Uji coba Aplikasi SIKAP-LK	Operator satuan kerja masih belum memahami penerapan aplikasi SIKAP-LK	Menjelaskan secara intensif kepada operator satuan kerja mengenai penerapan aplikasi SIKAP-LK
6	Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK	Anggota tim efektif tidak dapat hadir rapat dalam penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK	Memanfaatkan media ruang meeting *virtual* dalam penyempurnaan aplikasi SIKAP-LK
7	Penyusunan buku panduan (*manual book*) SIKAP-LK	Buku panduan dibuat terlalu teknis sehingga *user* yang kurang paham terkait IT sulit memahami	1. Dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua user 2. Dilakukan uji publik/user sebelum buku panduan naik cetak
8	Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam	1. Terjadinya miskoordinasi yang menghambat dalam proses penyusunan dan penandatanganan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan perbaikan SOP Penyusunan Laporan	1. Konsep/rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri akan disampaikan ke Biro Hukum pada akhir Oktober untuk mulai pembahasan. 2. Dilaksanakan rapat koordinasi

No.	Tahapan	Potensi Masalah	Solusi
	Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan”	Keuangan Kemendagri 2. Uji coba aplikasi memakan waktu yang lama dikarenakan tidak ada *feedback* dari satker	sekaligus ujicoba aplikasi pada minggu ke-3 bulan Oktober sekaligus meminta masukan dari operator penyusun LK
9	Sosialisasi dan *coaching* Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tentang “Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan” kepada komponen lingkup Kemendagri	Tidak adanya anggaran dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan *coaching*	Menyusun rencana kegiatan di Biro Keuangan dan Aset dan menetapkan kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan menyiapkan rencana penarikan dananya

Tabel I. 8 Identifikasi Potensi Masalah dan Solusi

I. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Penjabaran faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dituangkan dalam tabel I.1.

No	Tahapan/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Faktor Kunci Keberhasilan
1	Revisi Anggaran untuk optimalisasi keuangan dan aset	Tersedianya anggaran untuk pembangunan aplikasi	1. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja yaitu Biro Perencanaan 2. Persetujuan pimpinan

No	Tahapan/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Faktor Kunci Keberhasilan
2	Penyampaian rencana proyek kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor	Bapak Sekretaris Jenderal memberikan *input* dan *support*	1. Penyajian data yang akurat 2. *Exercise* menggunakan *flowchart*/diagram
3	Pembentukan Tim Efektif	Proyek perubahan dan aplikasi tersusun tepat waktu	1. Masing-masing anggota fokus terhadap tugas yang diberikan 2. Koordinasi intensif antar anggota tim
4	Perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK	Tersusunnya *Design dan Flowchart* Aplikasi SIKAP-LK, *Prototype* Aplikasi SIKAP-LK	1. Dukungan mentor 2. Ketelitian dan kecermatan tim dalam membangun aplikasi 3. Kedisiplinan dalam memantau dan mengevaluasi proses pembangunan aplikasi
5	Uji coba Aplikasi SIKAP-LK	1. Operator dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi SIKAP-LK 2. Sistem aplikasi dapat berjalan dengan baik	1. Dukungan mentor 2. Penyiapan sumber daya manusia sebagai *trainer* 3. Penyiapan sumber daya berupa perangkat dan server yang memadai
6	Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK	Aplikasi dapat berjalan untuk penyusunan laporan keuangan periode berikutnya	1. Dukungan mentor 2. *Feedback* dari satuan kerja lingkup Kemendagri 3. Dukungan pihak ketiga (vendor) untuk menyempurnakan aplikasi
7	Penyusunan buku panduan (*manual book*) SIKAP-LK	Tersusunnya buku panduan (*manual book*) Aplikasi SIKAP-LK	1. Dukungan mentor 2. Kompetensi dalam menjelaskan penggunaan aplikasi 3. Ketersediaan informasi mengenai alur aplikasi secara utuh

No	Tahapan/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Faktor Kunci Keberhasilan
8	Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"	Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan	1. Dukungan mentor 2. Dukungan seluruh unit kerja terkait penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
9	Sosialisasi dan *coaching* Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri	Penerapan aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya	1. Dukungan mentor 2. Dukungan seluruh unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri

Tabel I. 9 Faktor Kunci Keberhasilan

J. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Struktur tim yang terlibat dalam penyelenggaraan inovasi ini dapat digambarkan dalam susunan sebagai berikut:

1. Mentor sebagai *project sponsor*: Bapak Sekretaris Jenderal

   Secara umum, mentor memiliki peran sebagai pembimbing yang berlandaskan pada sikap profesionalisme, memberikan dukungan penuh dalam perancangan, memberikan persetujuan atas rancangan inovasi proyek perubahan, memantau dan memberikan timbal balik

atas perkembangan proyek perubahan, dan menjadi inspirator bagi *project leader* untuk melakukan inovasi yang dilakukan.

2. *Coach*

   Coach memiliki peran sebagai konselor *project leader* dalam mengerjakan inovasi dan melakukan pemantauan bagi perkembangan inovasi dari *project leader*.

3. *Project Leader*: Kepala Biro Keuangan dan Aset

   Project leader memiliki peran menyusun rancangan inovasi perubahan, mendelegasikan pembuatan laporan rancangan inovasi perubahan, menyelenggarakan kesepakatan dengan *stakeholder*, memimpin eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, dan menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* agar dapat mendukung keseluruhan tahapan implementasi.

4. Tim Pelaksana: Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan staf pada Biro Keuangan dan Aset serta pihak ketiga sebagai pembuat aplikasi

   Tim pelaksana memiliki peran untuk mendukung *project leader* dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pada proyek perubahan.

5. *Stakeholders*

   Stakeholders berperan dalam mendukung dan memberikan timbal balik atas proses bisnis yang mendapat nilai tambah dari tersusunnya inovasi. *Stakeholders* pada proyek perubahan ini terdiri atas:

   a. Internal, yaitu satuan kerja lingkup Kemendagri sebagai pengguna dari inovasi yang diciptakan dari proyek perubahan.
   b. Eksternal, yaitu Kementerian Keuangan sebagai pembina penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa laporan keuangan.

K. KETERKAITAN DENGAN AGENDA PEMBELAJARAN

Penyusunan rancangan proyek perubahan ini merupakan implementasi dari empat agenda materi pembelajaran antara lain sebagai berikut:

No.	Agenda	Keterangan
1.	Energi Kepemimpinan	1. Mengoptimalkan sumber daya manusia potensial yang ada dan mengarahkan khususnya dalam membangun SDM yang cerdas dan mampu aktif memanfaatkan perkembangan teknologi 2. Menyusun kebijakan terkait inovasi dalam penyusunan laporan keuangan 3. Usulan Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk penempatan SDM lulusan PKN STAN disesuaikan dengan MoU antara KemenpanRB, Kemenkeu, dan Kemendagri.
2.	Kepemimpinan digital, Kepemimpinan Kewirausahaan, dan Organisasi Pembelajar	1. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Dalam menyambut era *society 5.0* (*smart society*) dibutuhkan penyesuaian untuk menghadapi masa depan akan munculnya berbagai jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. 3. Dibutuhkan perubahan yang bisa beradaptasi secara komprehensif dalam menyusun laporan keuangan 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penyusunan laporan

No.	Agenda	Keterangan
		keuangan lebih cepat, cermat, dan akuntabel 5. Mengadakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIKAP-LK untuk meningkatkan kemampuan SDM penyusunan laporan keuangan
3.	Manajemen strategis Sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, *public private partnership*	1. Membangun Aplikasi (SIKAP-LK) dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat mendukung terpenuhinya kecukupan pengungkapan yang menjadi salah satu kriteria dalam mempertahankan opini WTP sebagai target dalam RENSTRA 2. Menyampaikan dan meyakinkan komponen lingkup Kemendagri untuk mengimplementasikan aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan laporan keuangan 3. Memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membuat aplikasi SIKAP-LK sebagai implementasi dari *public private partnership*
4.	*Policy brief* dan Proyek perubahan	Terdapat Permasalahan dalam menyusun Laporan Keuangan berupa: 1. Belum lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian 2. Rendahnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian

No.	Agenda	Keterangan
		3. Tidak ditaatinya jadwal waktu penyampaian laporan keuangan 4. Keterbatasan waktu pengungkapan CaLK Dari permasalahan di atas, kami menawarkan kebijakan dan rekomendasi yaitu perlunya peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan kemendagri melalui pengembangan kapasitas SDM dan sarana penyampaian informasi

Tabel I. 10 Kaitan dengan Pembelajaran

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

Capaian tahapan rencana strategis merupakan uraian pelaksanaan proyek perubahan yang memuat tahapan kegiatan, waktu pelaksanan, dan output dari setiap tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan berikut dibatasi untuk tahapan yang telah dilaksanakan pada jangka pendek. Tahapan jangka pendek merupakan tahapan utama dalam melaksanakan kegiatan proyek perubahan dalam rangka menyusun strategi peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan kemendagri melalui pengembangan kapasitas SDM dan sarana penyampaian informasi. Berikut merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan tahapan strategis jangka pendek:

1. Revisi Anggaran untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset

Pada tahap ini, *project leader* mendiskusikan proyek perubahan kepada pimpinan lingkup Biro Keuangan dan Aset dan kendala berupa kegiatan yang mendukung proyek perubahan belum dianggarkan sebelumnya. Diskusi ini melibatkan Biro Perencanaan untuk meminta dukungan berupa masukan teknis mengenai mekanisme revisi.

Aktivitas yang dilakukan untuk menyusun revisi anggaran untuk optimalisasi tata keuangan dan aset adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset	Oktober 2022	Undangan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset
2.	Melaksanakan rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset		Laporan hasil rapat pembahasan usulan revisi lingkup Biro Keuangan dan Aset
3.	Koordinasi dengan Biro Perencanaan		DIPA hasil revisi

Tabel II. 1 Tahapan Kegiatan Revisi Anggaran untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset

Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana dengan menghasilkan output akhir berupa DIPA hasil revisi yang memunculkan akun belanja modal dalam rangka penyusunan Aplikasi SIKAP-LK.

Gambar II. 1 Koordinasi Revisi Anggaran untuk Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset

2. Memaparkan rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor

Pada tahap ini, *project leader* menyampaikan ide inovasi proyek perubahan kepada mentor yaitu Bapak Sekretaris Jenderal. Penyampaian ide pada kesempatan tersebut memuat urjensi dari proyek perubahan dan dampak yang akan dihasilkan dari dijalankannya proyek perubahan. Bapak Sekretaris Jenderal menandatangani berita acara persetujuan proyek perubahan. Aktivitas yang dilakukan dalam memaparkan rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menghadap Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor	Oktober s.d. November 2022	Paparan proyek perubahan
2.	Melaporkan rencana dan progres proyek kepada Bapak Sekretaris Jenderal secara berkala		Penandatangan Berita Acara persetujuan dan kemajuan pelaksanaan tahapan oleh Bapak Sekretaris Jenderal

Tabel II. 2 Tahapan Kegiatan Pemaparan Rencana Proyek Perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal

Pelaksanaan kegiatan memaparkan rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor telah berjalan sesuai dengan rencana dengan menghasilkan output utama Berita Acara Persetujuan pelaksanaan proyek perubahan oleh Bapak Sekretaris Jenderal.

3. Pembentukan Tim Efektif

Pada tahapan ini, *project leader* mengadakan rapat dengan pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset untuk membentuk tim efektif guna mendukung penyusunan proyek perubahan. Pembentukan tim efektif ini mempertimbangkan tugas dan fungsi yang selaras dengan ide utama dari proyek perubahan. Output utama dari pembentukan tim efektif ini adalah tersusunnya Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Aset tentang Tim Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Aktivitas yang dilakukan dalam pembentukan tim efektif adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset	September s.d. Oktober 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat dengan para pejabat lingkup Biro Keuangan dan Aset tentang penyusunan tim efektif		Laporan rapat
3.	Menyusun SK Tim Efektif		Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Aset tentang Tim Efektif Strategi Peningkatan

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
			Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
4.	Tim Efektif melaksanakan tugas sesuai dengan peran yang ditetapkan		Dokumentasi pelaksanan tugas oleh tim efektif

Tabel II. 3 Tahapan Kegiatan Pembentukan Tim Efektif

Gambar II. 2 Rapat bersama Tim Efektif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Tlp. (021) 3524260, 348 30931, Fax. (021) 348 30931, *Web.*: www.kemendagri.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN ASET
NOMOR: 900/2232/BKA

TENTANG

TIM EFEKTIF STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN ASET,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, perlu dibangun Strategi Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Gambar II. 3 Surat Keputusan pembentukan tim efektif

4. Perancangan dan pembangunan Aplikasi SIKAP-LK

Tahap ini dimulai dengan menentukan pihak ketiga yang akan membangun aplikasi dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai aplikasi dan fitur yang dibutuhkan pada aplikasi. Pihak ketiga dimaksud adalah PT FAYIZREKA ARTA MUSTARI yang bertempat di Bandung, Jawa Barat sehingga proses koordinasi dilakukan melalui perpaduan rapat secara daring dan luring. Aktivitas yang dilakukan dalam merancang dan membangun aplikasi SIKAP-LK adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembangun aplikasi	Oktober 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat tentang perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK dalam rangka percepatan penghimpunan kelengkapan dokumen sumber untuk menyusun CaLK di tingkat Kementerian		Laporan rapat
3.	Memantau progres penyusunan design aplikasi		Design aplikasi SIKAP-LK

Tabel II. 4 Perancangan dan pembangunan Aplikasi SIKAP-LK

Gambar II. 4 Rapat koordinasi dengan pihak ketiga pengembang Aplikasi SIKAP-LK

Gambar II. 5 Rapat bersama Pusat Data dan Informasi terkait Penempatan Server Aplikasi SIKAP-LK

Pelaksanaan tahap perancangan dan pembangunan Aplikasi SIKAP-LK dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, sebagai perluasan dari tahapan ini tim efektif juga berkoordinasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) mengenai penempatan aplikasi pada *server* Kementerian Dalam Negeri.

5. Uji Coba Aplikasi SIKAP-LK

Pada tahap ini, aplikasi yang telah memiliki fitur-fitur utama dilakukan uji coba. Kegiatan uji coba ini melibatkan satuan kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2022. Output utama dari tahapan ini adalah laporan keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022 sebagai hasil dari uji coba Aplikasi SIKAP-LK. Aktivitas yang dilakukan dalam uji coba aplikasi SIKAP-LK adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri	Oktober 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat tentang uji coba aplikasi SIKAP-LK		Laporan rapat
3.	Melaksanakan koordinasi penyampaian CaLK tepat waktu		Laporan Keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022
4.	Menyusun laporan keuangan Kemendagri dengan implementasi Aplikasi SIKAP-LK		Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan keuangan dan implementasi aplikasi SIKAP-LK

Tabel II. 5 Tahap Kegiatan Uji Coba Aplikasi SIKAP-LK

Gambar II. 6 Kegiatan Uji Coba Aplikasi SIKAP-LK

Gambar II. 7 Cover Laporan Keuangan Kemendagri Triwulan III Tahun 2022

Tahapan ini melibatkan penyusun laporan keuangan dari satker-satker di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat

tercipta pengembangan SDM penyusun laporan keuangan lingkup Kemendagri, baik dari peningkatan proses penyusunan laporan keuangan maupun peningkatan kemampuan dari penyusun laporan keuangan Kemendagri.

6. Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK

Pada tahap ini, tim efektif bersama dengan pihak ketiga membahas tentang perkembangan Aplikasi SIKAP-LK agar dapat dihasilkan dengan fitur dan tampilan yang lebih baik. Output utama dari tahapan ini adalah Aplikasi SIKAP-LK hasil penyempurnaan yang siap digunakan untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Aktivitas pada tahapan ini terdiri dari:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK	November 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat tentang penyempurnaan aplikasi SIKAP-LK		Aplikasi SIKAP-LK hasil penyempurnaan

Tabel II. 6 Tahap Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK

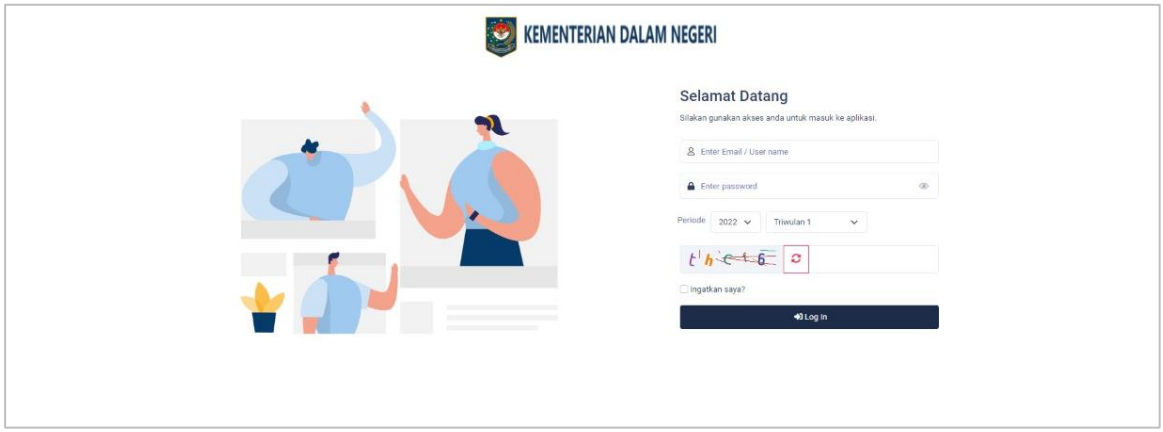

Gambar II. 8 Halaman Muka Aplikasi SIKAP-LK setelah Tahap Penyempurnaan

7. Penyusunan buku panduan (*manual book*) aplikasi SIKAP-LK

Pada tahap ini, sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya, tim efektif bersama dengan pihak ketiga menyusun buku panduan sebagai sarana untuk membantu penyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi

SIKAP-LK. Output utama dari tahapan ini adalah buku panduan dari aplikasi SIKAP-LK.

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan pihak ketiga pembuat aplikasi SIKAP-LK	November 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat tentang penyusunan buku panduan aplikasi SIKAP-LK		Buku panduan aplikasi SIKAP-LK

Tabel II. 7 Tahap Kegiatan Penyusunan Buku Panduan SIKAP-LK

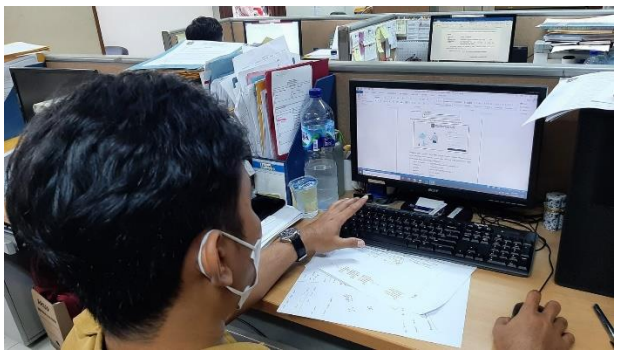

Gambar II. 9 Penyusunan Buku Panduan Aplikasi SIKAP-LK

Gambar II. 10 Buku Panduan Aplikasi SIKAP-LK

8. Penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"

Sebagai bentuk dari legalisasi dari proses pengungkapan informasi pada CaLK yang semakin baik yang sekaligus mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas perlu menyajikan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, disusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 Tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi Pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. Selain Keputusan Menteri Dalam Negeri, disusun juga penyesuaian *standar operational procedure* (SOP) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).

Pada tahap ini, tim efektif berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam penerbitan Kepmendagri dan Biro Organisasi dan Tata Laksana dalam penyampaian SOP penyusunan laporan keuangan. Output utama dari tahap ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 Tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi Pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Tahapan ini terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan biro hukum	November 2022	Undangan rapat
2.	Mengadakan rapat tentang penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri		Draf Keputusan Menteri Dalam Negeri
3.	Perbaikan SOP penyusunan Laporan Keuangan		SOP penyusunan Laporan Keuangan yang telah diperbarui

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
4.	Pembahasan draf Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"		Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan"
5.	Menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri kepada komponen lingkup Kemendagri		Surat kepada komponen terkait penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada komponen lingkup Kemendagri

Tabel II. 8 Tahapan Kegiatan Penyusunan Kepmendagri Pengungkapan Informasi pada CaLK dengan Memanfaatkan TI

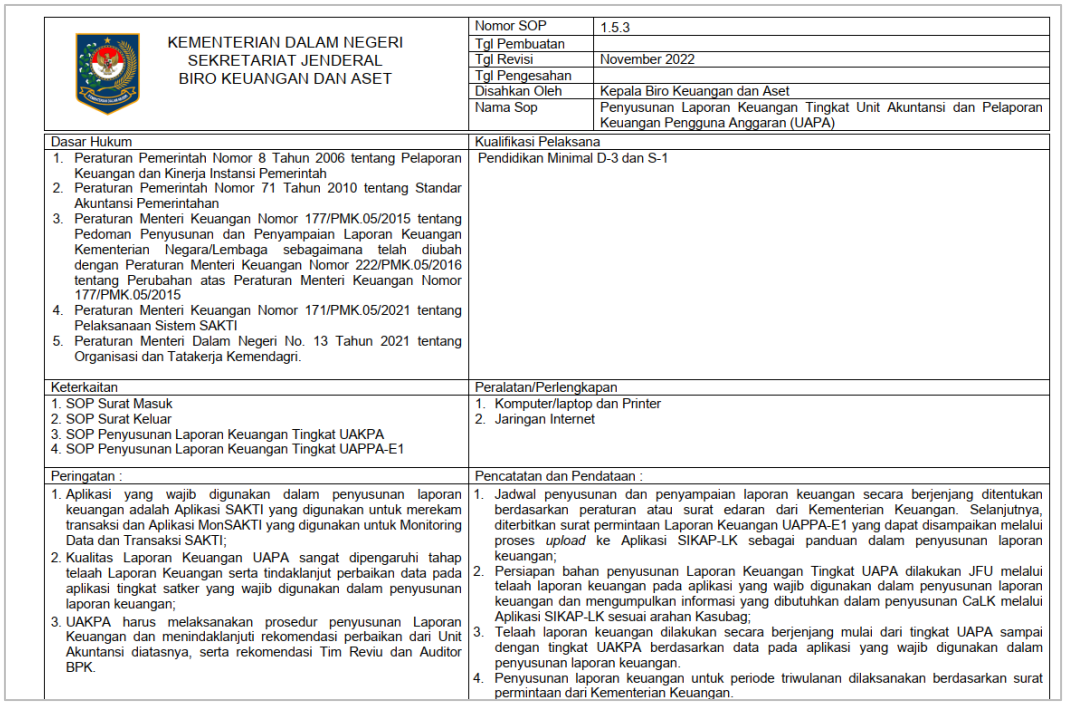

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN ASET		
	Nomor SOP	1.5.3
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	November 2022
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Keuangan dan Aset
	Nama Sop	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Kemendagri.	Pendidikan Minimal D-3 dan S-1
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1	1. Komputer/laptop dan Printer 2. Jaringan Internet
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Aplikasi yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk merekam transaksi dan Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk Monitoring Data dan Transaksi SAKTI; 2. Kualitas Laporan Keuangan UAPA sangat dipengaruhi tahap telaah Laporan Keuangan serta tindaklanjut perbaikan data pada aplikasi tingkat satker yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; 3. UAKPA harus melaksanakan prosedur penyusunan Laporan Keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Unit Akuntansi diatasnya, serta rekomendasi Tim Reviu dan Auditor BPK.	1. Jadwal penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara berjenjang ditentukan berdasarkan peraturan atau surat edaran dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, diterbitkan surat permintaan Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang dapat disampaikan melalui proses *upload* ke Aplikasi SIKAP-LK sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan; 2. Persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukan JFU melalui telaah laporan keuangan pada aplikasi yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK melalui Aplikasi SIKAP-LK sesuai arahan Kasubag; 3. Telaah laporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat UAPA sampai dengan tingkat UAKPA berdasarkan data pada aplikasi yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 4. Penyusunan laporan keuangan untuk periode triwulanan dilaksanakan berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Keuangan.

Gambar II. 11 Halaman Muka Perbaikan SOP Penyusunan Laporan Keuangan Kemendagri

15.	Menerima, memeriksa, dan menandatangani laporan keuangan, memberikan arahan dan mengembalikan kepada bawahan Laporan Keuangan UAPA Semester I/*Unaudited* untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, BPK, dan Tim Reviu.	B						Laporan Keuangan UAPA Semester I/*Unaudited*, ND Pengantar ke Menteri	60 Menit	Laporan Keuangan UAPA Semester I/*Unaudited*	
16.	Mengklarifikasi penyajian Laporan Keuangan *Unaudited* kepada BPK, menerima rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, serta menugaskan Kasubag dan JFU berkoordinasi dengan UAPPA-E1 untuk melakukan koreksi sesuai rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, dan identifikasi kesalahan lainnya penyajian laporan keuangan.				B			Laporan Keuangan UAPA *Unaudited* dan Kertas Kerja Penyusunan LK	3 Hari	Jurnal usulan korerksi BPK	Audit Laporan Keuangan dilakukan terhadap Laporan Keuangan periode Tahunan
17.	JFU berkoordinasi dengan UAPPA-E1 untuk melakukan koreksi sesuai rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, identifikasi kesalahan lainnya penyajian laporan keuangan yang harus dikoreksi, serta menyusun daftar jurnal koreksi tingkat Kementerian dan						4	Jurnal usulan korerksi BPK, usulan koreksi dari UAPPA-E1 atau UAPA	3 Hari	Daftar jurnal koreksi yang berasal dari usulan	Daftar jurnal koreksi berisi rincian jurnal koreksi yg berasal dari usulan koreksi Unit Eselon I

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		MENTERI	SEKJEN	KARO	KABAG	KASUBBAG	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	melaporkan kepada Kasubag.						4			koreksi BPK dan Kemendagri, termasuk usulan koreksi CaLK	(daftar jurnal koreksi Es1). Usulan koreksi CaLK dapat diakomodir melalui Aplikasi SIKAP-LK.
18.	Bersama JFU menyusun Kertas Kerja penyusunan Nota Kesepakatan berdasarkan rekomendasi/usulan							Daftar jurnal koreksi yang berasal dari	3 Hari	Kertas Kerja penyusun	

Gambar II. 12 Potongan Isi Perbaikan SOP Penyusunan Laporan Keuangan Kemendagri

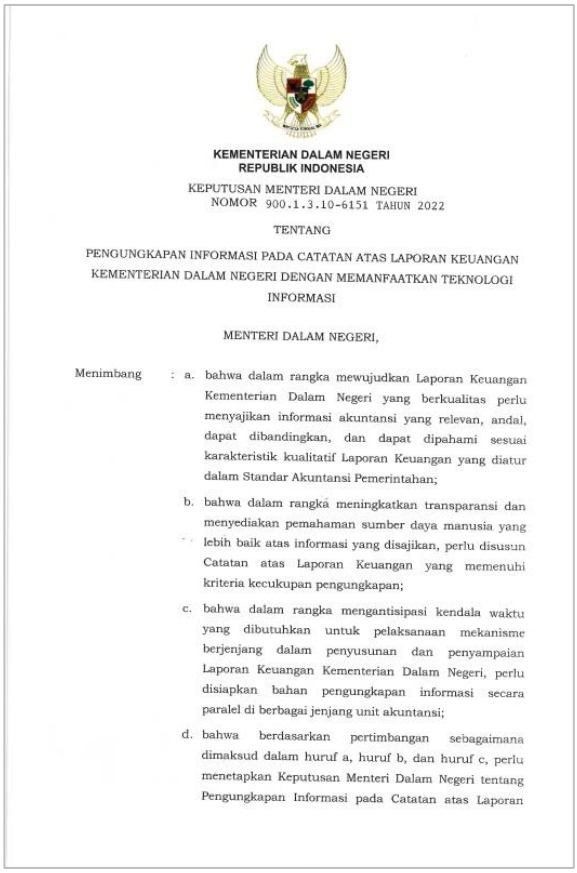

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.3.10-6151 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas perlu menyajikan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan menyediakan pemahaman sumber daya manusia yang lebih baik atas informasi yang disajikan, perlu disusun Catatan atas Laporan Keuangan yang memenuhi kriteria kecukupan pengungkapan;

c. bahwa dalam rangka mengantisipasi kendala waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan mekanisme berjenjang dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, perlu disiapkan bahan pengungkapan informasi secara paralel di berbagai jenjang unit akuntansi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan

Gambar II. 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 tentang Pengungkapan Informasi pada CaLK Kemendagri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

9. Sosialisasi dan *coaching* Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri

Tahap akhir dari proyek perubahan ini adalah melakukan sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah pemahaman SDM penyusun laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi penggunaan Aplikasi SIKAP-LK dalam menyusun laporan keuangan.

Tahapan ini terdiri dari beberapa aktivitas antara lain sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Menyusun undangan rapat antara tim efektif dengan komponen lingkup Kemendagri	November 2022	Undangan rapat
2.	Menyusun video singkat tentang penerapan aplikasi SIKAP-LK		Video singkat aplikasi SIKAP-LK
3.	Mengadakan rapat tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri		Laporan rapat tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri
4.	Mengadakan coaching kepada operator (SDM) lingkup Kemendagri mengenai pengoperasian aplikasi SIKAP-LK		Dokumentasi kegiatan coaching kepada operator (SDM) lingkup Kemendagri mengenai pengoperasian aplikasi SIKAP-LK

Tabel II. 9 Tahapan Kegiatan Sosialisasi dan coaching Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri

Gambar II. 14 Sosialisasi dan coaching Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang "Pemanfaatan Aplikasi SIKAP-LK dalam Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan" kepada komponen lingkup Kemendagri

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Implementasi strategi marketing merupakan proses penggantian strategi/rencana yang telah disusun menjadi tindakan marketing (pemasaran) agar dapat mencapai tujuan. Tindakan marketing yang dimaksud adalah mempengaruhi *stakeholder* yang menjadi pihak-pihak terkait proyek perubahan ini. Mengingat pentingnya manfaat dari proyek perubahan berupa peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada

catatan atas laporan keuangan kemendagri melalui pengembangan kapasitas sdm dan sarana penyampaian informasi, perlu didukung oleh *stakeholders* di Lingkungan Kemendagri dalam bentuk strategi marketing.

Proyek perubahan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan jangka pendek menghasilkan aplikasi SIKAP-LK dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 Tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi Pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam kurun waktu dua bulan (Oktober s.d. November 2022). Hasil dari identifikasi dan peta *stakeholders* akan menentukan strategi agar *stakeholders* dapat mendukung proyek perubahan. Tabel II.10 merupakan pemetaan *stakeholders.*

No.	***Stakeholders***	**Pengaruh**	**Kepentingan**	**Analisis *Stakeholders***
1.	Bapak Sekretaris Jenderal	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
2.	Kepala Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
3.	Kepala Sub Bagian lingkup Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
4.	Tim IT pengembang aplikasi	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
5.	Staf pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan dan Aset	Tinggi	Tinggi	*Promoters*
6.	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Tinggi	Rendah	*Latents*

No.	*Stakeholders*	Pengaruh	Kepentingan	Analisis *Stakeholders*
7.	Badan Pemeriksa Keuangan	Tinggi	Rendah	*Latents*
8.	Satuan kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri	Tinggi	Rendah	*Latents*
9.	Seluruh staf pada Biro Keuangan dan Aset	Rendah	Tinggi	*Defenders*
10.	Website Kemendagri sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 9	Rendah	Rendah	*Apathetics*

Tabel II. 10 Identifikasi Stakeholders

Dalam rangka meminta dukungan *stakeholders* demi tercapainya tujuan dari proyek perubahan ini, terdapat beberapa tahapan yang telah kami laksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Meminta persetujuan **Bapak Sekretaris Jenderal** sebagai mentor

Bapak Sekretaris Jenderal sebagai mentor memiliki jenis peran *stakeholder* sebagai *promoters* yang memiliki *level of influence and interest* paling tinggi di antara *promoters stakeholder* lainnya karena merupakan atasan langsung yang memiliki peran untuk mengawasi tugas dan fungsi dari lingkup kerja *project leader*. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Bapak Sekretaris Jenderal, perlu adanya penjelasan yang komprehensif kepada Bapak Sekretaris Jenderal mengenai maksud dan tujuan proyek perubahan yang akan dilaksanakan. Penjelasan ini dibuat dalam bentuk paparan yang di dalamnya terdapat urjensi perlunya proyek perubahan yaitu strategi peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan kemendagri melalui pengembangan kapasitas SDM dan sarana penyampaian informasi dan dampak yang dihasilkan oleh proyek perubahan tersebut.

Sebagai bentuk dari keberhasilan atas penyampaian permintaan dukungan kepada Bapak Sekretaris Jenderal, telah ditandatangani persetujuan proposal atas proyek perubahan “Strategi Peningkatan Kualitas Informasi Yang Disajikan Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi”. Kemudian sebagai tindak lanjut dari berjalannya pelaksanaan capaian tahapan strategis, Bapak Sekretaris Jenderal telah menyetujui dan menyatakan dukungan kepada *project leader* atas proyek perubahan yang disusun.

Gambar II. 15 Permintaan Persetujuan dan Dukungan Bapak Sekretaris Jenderal

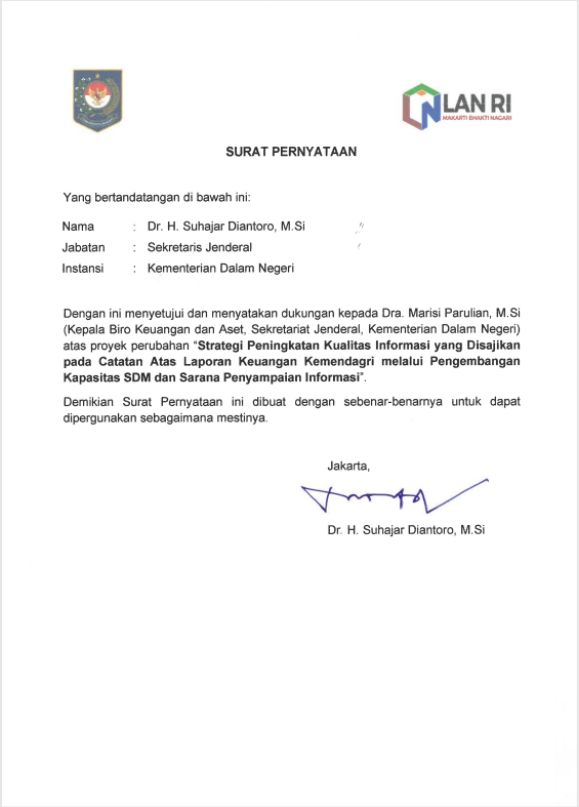

LAN RI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Dengan ini menyetujui dan menyatakan dukungan kepada Dra. Marisi Parulian, M.Si (Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri) atas proyek perubahan “**Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi**”.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Gambar II. 16 Persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal tentang Proyek Perubahan

Meminta persetujuan *coach*

Coach dari *project leader* juga merupakan pihak *promoters* dari terselenggaranya proyek perubahan ini karena berperan dalam mengawal dan membimbing tahap demi tahap kegiatan pencapaian rencana strategis. Sarana komunikasi yang ditempuh oleh *project leader* kepada *coach* adalah dengan melakukan bimbingan secara intensif untuk mendapatkan masukan dan arahan mengenai jalannya proyek perubahan yang dilaksanakan.

Bentuk dukungan dari *coach* adalah berupa ditandatanganinya dan disetujuinya proposal rancangan proyek perubahan "Strategi Peningkatan Kualitas Informasi Yang Disajikan Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri Melalui Pengembangan Kapasitas SDM Dan Sarana Penyampaian Informasi".

Gambar II. 17 Berkonsultasi dengan Coach untuk mendapat persetujuan proyek perubahan

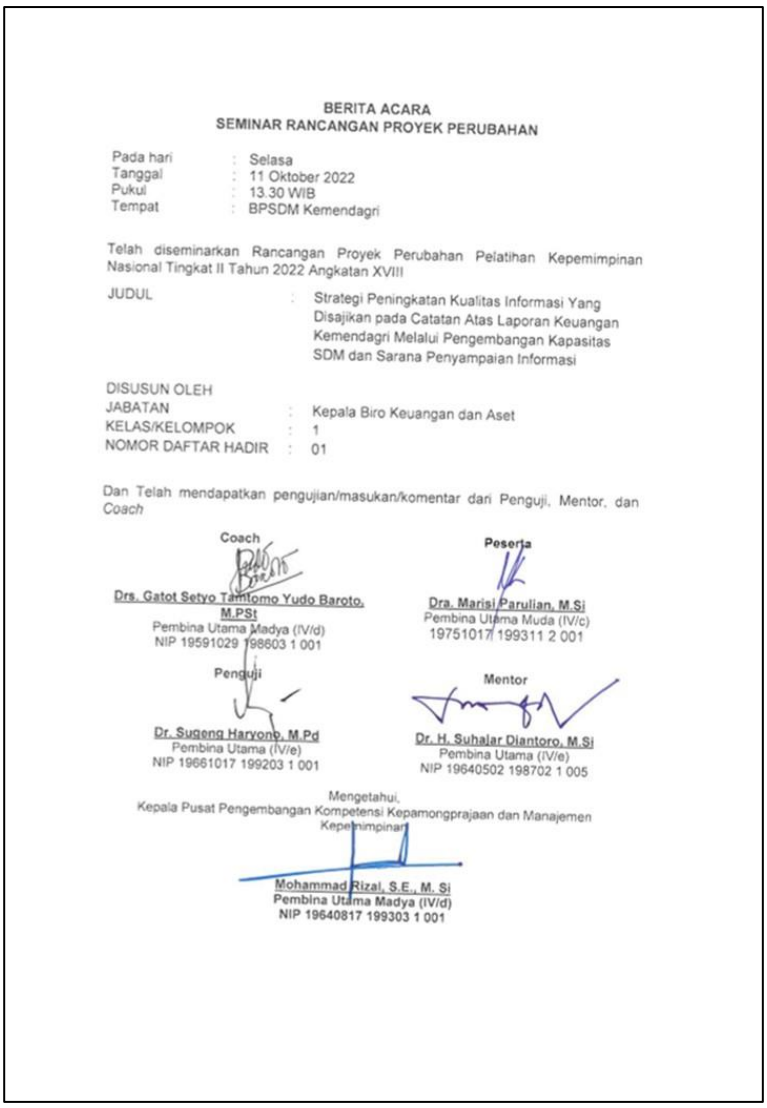

BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Selasa
Tanggal : 11 Oktober 2022
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XVIII

JUDUL : Strategi Peningkatan Kualitas Informasi Yang Disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri Melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi

DISUSUN OLEH
JABATAN : Kepala Biro Keuangan dan Aset
KELAS/KELOMPOK : 1
NOMOR DAFTAR HADIR : 01

Dan Telah mendapatkan pengujian/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan *Coach*

Coach
Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M.PSt
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19591029 198603 1 001

Peserta
Dra. Marisi Parulian, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19751017 199311 2 001

Penguji
Dr. Sugeng Haryono, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19661017 199203 1 001

Mentor
Dr. H. Suhalar Diantoro, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19640502 198702 1 005

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19640817 199303 1 001

Gambar II. 18 Bukti Persetujuan Coach terhadap Proyek Perubahan

2. Membentuk tim efektif

Stakeholder dengan peran promoters lainnya adalah tim efektif. Tim efektif dapat dikatakan memiliki peran dan kepentingan besar dalam proyek perubahan ini karena keterlibatan langsung anggota tim dalam menjalankan proyek perubahan serta dampak langsung yang diperoleh ketika menjalankan tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan.

Ajakan kepada tim efektif pertama kali dilaksanakan melalui rapat bersama sebagai inisiasi awal penyusunan proyek perubahan. Tim efektif akhirnya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Aset tentang Tim

Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Gambar II. 19 Rapat bersama Tim Efektif

3. Melaksanakan koordinasi dengan tim IT pengembang aplikasi

Pengembang tim aplikasi merupakan pihak ketiga yang telah ditunjuk atas pertimbangan yang matang oleh tim efektif untuk mendukung proyek perubahan dengan membangun aplikasi SIKAP-LK sebagai *tools* dari Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan

Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi. Tim IT dimaksud adalah PT FAYIZREKA ARTA MUSTARI.

Bentuk dukungan Tim IT adalah dengan terbitnya surat perjanjian kerja dan berita acara hasil pekerjaan sebagai bukti komitmen dari tim IT untuk membangun aplikasi SIKAP-LK.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038,
Faksimile (021) 3458589, www.kemendagri.go.id, E-mail: akpa@kemendagri.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/157/PPK.BKA tanggal 7 Oktober 2022
Nama PPK:	Dra. Marlina Agus Setianingsih, M.M
Nama Penyedia:	**PT FAYIZREKA ARTA MUSTARI**
PAKET PENGADAAN : Aplikasi Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 003/Und/PPBJ-BKA/X/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 4 Oktober 2022 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 005/BA-EV/PPBJ-BKA/X/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 6 Oktober 2022
SUMBER DANA: *[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022 Nomor 010.01.1.403200/2021 untuk mata anggaran kegiatan 010.01WA.6084.EBD.955.051.A.536111*	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 44.955.000(Empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)	
Jenis Kontrak: Pengadaan Langsung	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dra. Marlina Agus Setianingsih, M.M NIP. 19660805 199303 2 006	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Fayizreka Arta Mustari T. Wawan Dermawan, SE Direktur

Gambar II. 20 Surat Perintah Kerja (SPK) PT Fayirezka Arta Mustari

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038,
Faksimile (021) 3458589, www.kemendagri.go.id, E-mail: akpa@kemendagri.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 000.4.3/189/PPK.BKA

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-11-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Marlina A. Setianingsih, M.M.**
   NIP : **19660805 199303 2 006**
   Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**

2. Nama : **T. Wawan Dermawan, SE**
   Jabatan : **Direktur**
   Alamat : Gedung Graha Mulia Sejahtera
   Jl. Terusan Jakarta No. 175A Bandung 40291

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor **027/157/PPK.BKA** tanggal **7 Oktober 2022** Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan **Aplikasi Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kemendagri SIKAP-LK**, Bahwa perusahaan tersebut di atas telah menyelesaikan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan baik sebagaimana rincian hasil pekerjaan terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PT. FAYIZREKA ARTA MUSTARI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
T. Wawan Dermawan, SE	Dra. Marlina Agus Setianingsih, M.M
Direktur	NIP. 19660805 199303 2 006

Gambar II. 21 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pembangunan Aplikasi SIKAP-LK

4. Meminta dukungan dari Kepala Bagian Keuangan Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri

Kepala Bagian Keuangan UKE I Kemendagri merupakan pimpinan yang membawahi tugas untuk menyusun laporan keuangan pada tingkat UAPPA-E1 Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala Bagian Keuangan merupakan stakeholder yang mendapat dampak yang besar dengan adanya Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi ini karena terdapat inovasi berupa Aplikasi SIKAP-LK, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta pembaruan alur kerja baru dari penyusunan laporan keuangan.

Sebagai bentuk dukungan dari Kepala Bagian Keuangan UKE I Kemendagri, telah ditandatangani Surat Pernyataan Dukungan atas proyek perubahan Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi oleh seluruh Kepala Bagian Keuangan UKE I Kemendagri.

LAN RI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kabag Keuangan **Setjen** (.....)	Kabag Keuangan **Itjen** (.....)	Kabag Keuangan **Ditjen Polpum** (.....)
Kabag Keuangan **Ditjen Adwil** (.....)	Kabag Keuangan **Ditjen Otda** (.....)	Kabag Keuangan **Ditjen Bangda** (.....)
Kabag Keuangan **Ditjen Pemdes** (.....)	Kabag Keuangan **Ditjen Dukcapil** (.....)	Kabag Keuangan **Ditjen Keuda** (.....)
Kabag Keuangan **Badan Litbang** (.....)	Kabag Keuangan **BPSDM** (.....)	Kabag Keuangan **IPDN** (.....)

Dengan ini menyatakan dukungan kepada Dra. Marisi Parulian, Msi (Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri) atas proyek perubahan "**Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi**".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambar II. 22 Pernyataan Dukungan dari Kepala Bagian Keuangan lingkup Kemendagri

5. Meminta dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BPK RI merupakan stakeholder yang memiliki peran memeriksa laporan keuangan Kemendagri. Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi akan

memperbaiki kualitas penyajian informasi pada laporan keuangan kemendagri yang akan menjadi objek pemeriksaan dari BPK RI.

Dukungan dari BPK RI dituangkan dalam Surat Pernyataan Dukungan disertai dengan pernyataan yang memuat timbal balik positif terhadap tersusunnya Aplikasi SIKAP-LK.

LAN RI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Arman Syifa SST, M.Acc, Ak, CA, CSFA
Jabatan : Kepala Auditorat V.A.
Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan ini menyatakan dukungan kepada Dra. Marisi Parulian, Msi (Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri) atas proyek perubahan **"Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi"**.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Oktober 2022

Dr. Arman Syifa SST, M.Acc, Ak, CA, CSFA

Gambar II. 23 Pernyataan Dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan

6. Meminta dukungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan merupakan stakeholder yang memiliki peran membina penyusunan laporan keuangan Kemendagri. Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi akan meningkatkan kualitas penyajian informasi pada laporan keuangan

kemendagri yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dari fungsi pembinaan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan.

Dukungan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan dituangkan dalam Surat Pernyataan Dukungan disertai dengan pernyataan yang memuat timbal balik positif terhadap tersusunnya Aplikasi SIKAP-LK.

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.S.E
Jabatan : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Instansi : Kementerian Keuangan

Dengan ini menyatakan dukungan kepada Dra. Marisi Parulian, Msi (Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri) atas proyek perubahan "**Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi**".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 November 2022

Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.S.E

Gambar II. 24 Pernyataan Dukungan dari Kementerian Keuangan

7. Mempublikasikan kebijakan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan melalui website kemendagri

Website Kemendagri merupakan media sebagai sarana penyampaian informasi akan adanya inovasi baru dari Biro Keuangan dan Aset berupa

Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi. Bentuk dukungan dari Pusat Penerangan sebagai unit kerja yang membidangi publikasi adalah dengan terbitnya berita berupa peluncuran Aplikasi SIKAP-LK oleh Biro Keuangan dan Aset pada website Kemendagri.

Kemendagri Dorong Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan

28-11-2022 | 18:56 WIB

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kualitas informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal tersebut terlihat dari adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.3.10-6151 Tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kemendagri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Adapun Kepmendagri tersebut disosialisasikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri Marisi Parulian pada Rapat Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kemendagri. Acara tersebut digelar di Aula Gedung F Lantai 3 Kemendagri, Selasa (22/11/2022) lalu.

Gambar II. 25 Publikasi Proyek Perubahan pada Website Kemendagri

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

1. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar Internal

Aplikasi SIKAP-LK dan pengembangan kapasitas SDM adalah *tools* untuk menjalankan strategi peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan Kemendagri. Dengan demikian, pembangunan aplikasi SIKAP-LK membutuhkan koordinasi dan kerja sama tim yang baik secara komprehensif. Kerja sama tim ini dibentuk melalui

keterlibatan organisasi internal Biro Keuangan dan Aset yaitu Kepala Bagian dan Koordinator, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator, serta staf lingkup Biro Keuangan dan Aset untuk terlibat langsung di seluruh tahapan pencapain strategis untuk mewujudkan aplikasi SIKAP-LK dan pengembangan kapasitas SDM. Keterlibatan perangkat Biro Keuangan dan Aset ini diinisiasi oleh *project leader* dengan menetapkan SURAT KEPUTUSAN TIM EFEKTIF STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Dalam melaksanakan rencana strategis jangka pendek, manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan organisasi pembelajar internal adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sarana pembelajaran perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset dengan adanya pertukaran informasi dan dukungan antarbagian dan pendalaman akan substansi di luar tugas dan fungsi utama masing-masing perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset;
b. Sebagai sarana untuk melibatkan perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset dalam memunculkan gagasan, ide, serta perbaikan untuk perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas, spesifiknya penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
c. Sebagai sarana untuk pembekalan perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset agar dapat memudahkan pengembangan Aplikasi SIKAP-LK dan penyesuaian dalam pengembangan SDM di masa yang akan datang.

(insert gambar rapat internal Biro Keuangan dan Aset)

Project Leader telah mengupayakan pelaksanaan perannya secara intensif dalam menampung antusiasme seluruh perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset. Hal ini diwujudkan dengan terciptanya kolaborasi yang baik antarbagian Biro Keuangan dan Aset yang memungkinkan terlaksananya rencana strategis jangka pendek di antara pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat unit kerja Biro Keuangan dan Aset lainnya.

2. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar Eksternal

Selain pemberdayaan organisasi pembelajar internal, *Project Leader* juga mengupayakan pemberdayaan organisasi pembelajar eksternal. Ruang lingkup dari organisasi pembelajar eksternal organisasi dan institusi di luar Unit Kerja Biro Keuangan dan Aset yang turut mendukung kesuksesan dari tercapainya cita-cita rencana strategis dari terwujudnya strategi peningkatan kualitas informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan Kemendagri, yang terdiri dari:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku mentor sekaligus atasan langsung *project leader*;
b. Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai penyusun laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-E1;
c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Keuangan, sebagai Pembina penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
d. Auditorat V.A Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pemeriksa Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
e. Biro Hukum sebagai pihak yang berkoordinasi dengan tim efektif dalam menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 Tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi Pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai pihak yang memfasilitasi penempatan Aplikasi SIKAP-LK;
f. Pusat Penerangan sebagai pihak yang memfasilitasi publikasi ke Website Kemendagri;
g. Biro Organsiasi dan Tata Laksana sebagai pihak yang memfasilitasi tersusunnya pembaruan SOP; dan
h. Pihak ketiga sebagai tim pengembang aplikasi SIKAP-LK.

Melalui strategi peningkatan kualitas informasi pada CaLK ini, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan akan terbantu untuk menyediakan pengungkapan informasi terhadap laporan keuangan yang disusun serta mempermudah koordinasi dalam menyusun laporan

keuangan. Seiring dengan hal tersebut, terdaoat beberapa unit kerja di luar tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam kolaborasi sehingga memungkinkan untuk berbagi pandangan tentang pentingnya kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

BAB III

PENUTUP

A. LESSON LEARNT

Lesson learnt merupakan pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan selama penyusunan proyek perubahan. *Lesson learnt* dibagi menjadi empat sesuai dengan agenda pembelajaran sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Energi kepemimpinan

Memanfaatkan energi kepemimpinan berarti memanfaatkan posisi sebagai pimpinan untuk melaksanakan fungsi *managing* dari *leadership* untuk menggerakkan perangkat yang dipimpinnya mencapai tujuan bersama, yang mana dalam hal ini adalah terlaksananya proyek perubahan "Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi". Bentuk nyata dari keberhasilan penerapan energi kepemimpinan adalah dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Aset tentang Tim Efektif Strategi Peningkatan Kualitas Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang memuat susunan perangkat kerja beserta tugas dan peran masing-masing dalam melaksanakan proyek perubahan.

2. Kepemimpinan digital, Kepemimpinan Kewirausahaan, dan Organisasi Pembelajar

Penerapan kepimpinan digital pada proyek perubahan ini terletak pada pembangunan aplikasi SIKAP-LK sebagai keterlibatan teknologi yang menjadi media untuk mencapai tujuan organisasi, yakni meningkatkan kualitas penyajian informasi pada laporan keuangan. Media aplikasi ini dipadu dengan penerapan kewirausahaan yaitu dengan menyebarkan inovasi proyek perubahan kepada satker lingkup Kemendagri melalui forum rapat dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri dan perbaikan SOP penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Selain menerapkan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan, terdapat organisasi pembelajar yakni Biro Keuangan dan Aset sebagai

organisasi internal dan satker lingkup Kemendagri beserta instansi lain sebagai organisasi eksternal yang mendapat manfaat pada terlaksananya proyek perubahan.

3. Manajemen strategis Sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, *public private partnership*

Penerapan pembelajaran manajemen strategis sektor publik pada proyek perubahan adalah dengan adanya Aplikasi (SIKAP-LK) dalam proses penyusunan laporan keuangan, dapat terpenuhi kecukupan pengungkapan yang menjadi salah satu kriteria dalam mempertahankan opini WTP sebagai target dalam RENSTRA. Selain itu, penerapan marketing sektor publik adalah dengan menyampaikan dan meyakinkan komponen lingkup Kemendagri dan *stakeholder* pada instansi lain untuk mengimplementasikan aplikasi SIKAP-LK dalam penyusunan laporan keuangan. Pembangunan Aplikasi SIKAP-LK memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk membuat aplikasi SIKAP-LK sebagai implementasi dari *public private partnership*.

4. *Policy brief* dan Proyek perubahan

Penerapan *policy brief* dan proyek perubahan adalah dengan terbentuknya kemampuan menganalisa masalah yang terjadi di unit kerja Biro Keuangan dan Aset dan menyusun langkah penyelesaian yang dituangkan secara sitematis dalam proyek perubahan. Isu yang kami angkat pada proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut:

a. Lengkapnya informasi pada CaLK yang diberikan unit akuntansi di bawah unit akuntansi Kementerian;
b. Meningkatnya kualitas SDM akuntansi pada unit akuntansi di bawahnya yang mengabaikan pengungkapan informasi yang dibutuhkan unit akuntansi tingkat kementerian;
c. Penyusunan waktu penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan jadwal; dan
d. Kecukupan waktu pengungkapan CaLK.

B. KESIMPULAN

Biro Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara. Tugas ini termasuk di antaranya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan akuntansi, perhitungan anggaran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan serta penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi akuntansi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kriteria yang digunakan dalam pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentunya harus memperhatikan terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan dan kriteria yang digunakan dalam pemberian opini. Beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang disusunnya proyek perubahan "Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi" yaitu Keterbatasan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Unit Eselon I sebagai bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian, dan ketidakseragaman

pengungkapan informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan di berbagai jenjang unit akuntansi, beberapa informasi yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian memerlukan dokumen sumber yang berada pada Satker sebagai pendukung pengungkapan.

Penyusunan proyek perubahan sebagai langkah atas penyelesaian kendala dalam menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan dengan tercapainya tujuan dari tahapan-tahapan jangka pendek, yakni: 1) Tersusunnya revisi Anggaran untuk optimalisasi tata kelola keuangan dan aset, 2) Tersampaikannya Pemaparan Rencana proyek perubahan kepada Bapak Sekretaris Jenderal selaku mentor, 3) Terbentuknya Tim Efektif, 4) Terlaksananya Perancangan dan pembangunan aplikasi SIKAP-LK, 5) Terlaksananya Uji coba Aplikasi SIKAP-LK, 6) Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi SIKAP-LK, 7) Terlaksananya Penyusunan buku panduan (manual book) aplikasi SIKAP-LK, 8) Terlaksananya penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK di lingkungan Kemendagri dan perbaikan SOP penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, 9) Terlaksananya sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Aplikasi SIKAP-LK kepada komponen lingkup Kemendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana nomor 8) yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan dasar hukum yang menetapkan Aplikasi SIKAP-LK untuk digunakan pada berbagai jenjang unit akuntansi di Lingkungan Kemendagri dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan CaLK pada saat penyusunan laporan keuangan.

Sebagai kelanjutan dari capaian tahapan pada jangka pendek ini, hasil proyek perubahan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan untuk organisasi, baik Biro Keuangan dan Aset maupun komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai satuan kerja penyusun laporan keuangan.

C. SARAN

Pelaksanaan proyek perubahan yaitu Strategi Peningkatan Kualitas Informasi yang Disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kemendagri melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarana Penyampaian Informasi merupakan langkah inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan keuangan. Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

Rekomendasi kepada pihak internal kepada Biro Keuangan dan Aset

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.10-6151 tahun 2022 tentang Pengungkapan Informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi agar dapat dipedomani oleh SDM Penyusun Laporan Keuangan.
2. Aplikasi SIKAP-LK agar dapat menjadi *tools* yang terus digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri disertai pengembangan secara berkelanjutan.

Rekomendasi kepada pihak eksternal selain Biro Keuangan dan Aset

1. Aplikasi SIKAP-LK dapat menunjang aplikasi wajib Kementerian Keuangan yang sudah ada dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri pada periode pelaporan selanjutnya.
2. Aplikasi SIKAP-LK agar dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan terhadap penyajian informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK.

BAB IV

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengerjaan proyek perubahan ini melibatkan pengembangan dalam potensi diri antara lain:

No.	Komponen Pengembangan Diri	Sub Komponen Pengembangan Diri
1	Integritas	Menyusun Surat Keputusan Tim Efektif dalam rangka melibatkan skema kerja yang insidental seperti *task force*, satuan tugas, kepanitiaan dan lainnya dalam mengasah pemenuhan *output* kerja yang sifatnya jangka pendek dan berdasarkan target
2		Melakukan pemantauan progres kerja kepada anggota Tim Efektif
3		Memberikan tanggung jawab tugas berjenjang mulai pada Tim Efektif
4	Kerjasama	Meningkatkan kemampuan komunikasi untuk berkoordinasi dengan *stakeholders*
5		Memahami perbedaan pendapat dalam menampung aspirasi anggota tim efektif
6		Menjaga kualitas kerjasama dengan tim efektif
7	Mengelola Perubahan	Memimpin tim efektif dan memastikan indikator keberhasilan agenda kerja tim terdokumentasi dengan jelas dan sistematis atas program kerjanya.
8		Memimpin tim efektif yang secara spesifik akan menyiapkan langkah-langkah praktis menindaklanjuti suatu kebijakan atau arahan perubahan.
9		Menyusun program pengembangan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam penyusunan laporan keuangan lingkup Kemendagri

Tabel III. 1 Rencana Potensi Pengembangan Diri

Sementara itu, untuk *scoring* pengembangan diri setelah terlaksananya proyek perubahan terdapat pada Formulir Penilaian Sikap Perilaku PKN II: Peserta, Formulie Penilaian Sikap Perilaku PKN II: Mentor, Rekap Nilai Peserta, Rekap Nilai Mentor, Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor, serta Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta.

FORMULIR PESERTA

Nama : Dra. Marisi Parulian, MSi
NIP : 19751017 199311 2 001
Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Aset
Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Program :

Komponen		Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	9
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	9
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
		JUMLAH	**9,00**
KERJASAMA	7	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	8	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	9	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	9
	10	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	9
	11	Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	9
		JUMLAH	**9,00**
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	9
	13	Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	14	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	9
	15	Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	9
	16	Menjadi *agent of change* yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
		JUMLAH	**9,00**

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta	:	Dra. Marisi Parulian, MSi	**Nama Mentor**	:	Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP	:	19751017 199311 2 001	**NIP:**	:	19640502 198702 1 005
Jabatan	:	Kepala Biro Keuangan dan Aset	**Jabatan**	:	Sekretaris Jenderal
Instansi	:	Kementerian Dalam Negeri	**Instansi**	:	Kementerian Dalam Negeri
Program	:				

FORMULIR PENILAIAN SIKAP PERILAKU PKN II: MENTOR

Komponen		Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan	9
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis	9
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas	9
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
		JUMLAH	**9,00**
KERJASAMA	9	Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.	9
	10	Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya.	9
	11	Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi	9
	12	Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.	9
	13	Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	9
		JUMLAH	**9,00**
MENGELOLA PERUBAHAN	14	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	9
	15	Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	9
	16	Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang	9
	17	Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	9
	18	Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik.	9
		JUMLAH	**9,00**

REKAP NILAI PESERTA

Nama : Dra. Marisi Parulian, MSi
NIP : 19751017 199311 2 001
Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Aset
Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Program : 0

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	9	Istimewa
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**9,00**	Istimewa

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta	:	Dra. Marisi Parulian, MSi	**Nama Mentor**	:	Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP	:	19751017 199311 2 001	**NIP:**	:	19640502 198702 1 005
Jabatan	:	Kepala Biro Keuangan dan Aset	**Jabatan**	:	Sekretaris Jenderal
Instansi	:	Kementerian Dalam Negeri	**Instansi**	:	Kementerian Dalam Negeri
Program	:	0			

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	9	Istimewa
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**9,00**	Istimewa

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama	:	Dra. Marisi Parulian, MSi	**Nama Mentor**	:	Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP	:	19751017 199311 2 001	**NIP:**	:	19640502 198702 1 005
Jabatan	:	Kepala Biro Keuangan dan Aset	**Jabatan**	:	Sekretaris Jenderal
Instansi	:	Kementerian Dalam Negeri	**Instansi**	:	Kementerian Dalam Negeri
Program	:	0			

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**Istimewa**
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00	Istimewa
	Komunikasi	9	9	9,00	Istimewa
	Fleksibilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**Istimewa**
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9,00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**Istimewa**
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**9,00**	**9,00**	**9,00**	**Istimewa**

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	:	Dra. Marisi Parulian, MSi	**Nama Mentor**	:	Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP	:	19751017 199311 2 001	**NIP:**	:	19640502 198702 1 005
Jabatan	:	Kepala Biro Keuangan dan Aset	**Jabatan**	:	Sekretaris Jenderal
Instansi	:	Kementerian Dalam Negeri	**Instansi**	:	Kementerian Dalam Negeri
Program	:	0			

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub**
Peserta	9,00	9,00	9,00	9,00	**Istimewa**
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	**Istimewa**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**Istimewa**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Istimewa**	**Istimewa**	**Istimewa**	**Istimewa**	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9,00
Kualifikasi: Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Sangat Kurang	:	

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4884 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Hengki Permdi, dkk. 2016. “Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi (Kantor Jakarta dan Bogor)”. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 8 Nomor 2, November 2016

DAFTAR RIWAYAT

Nama : Dra. Marisi Parulian, M.Si

Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 17 Oktober 1975

Alamat : Asrama Brimob Jl. KS. Tubun III No.3A. RT012/RW006. Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Suami : Brigjen Pol John C. E. Nababan, SIK, SH, MH

Anak : Ezra Artha Ully Nababan
Irfa Wiyata Salomo Nababan
Christian Immanuel Nababan

Riwayat Pendidikan :

1. SD YPPK OMAOGA St. Agustinus Kab. Fakfak (1987)
2. SMP YPPK ST Don Bosco Kab. Fakfak (1990)
3. SMAN I Kab. Fakfak (1993)
4. STPDN Jatinangor (1997)
5. IIP Jakarta (2001)
6. S2 STIA Mandala Indonesia Jakarta (2009)
7. S3 IPDN Jakarta (2022)

Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. Pelaksana Jabatan Lurah Wosi Kecamatan Manokwari (1998)
2. Lurah Wosi (2000)
3. Pelaksana Jabatan Kepala Seksi Tramtib Kecamatan Manokwari (2001)
4. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan Manokwari (2002)
5. Kasubbag Protokol Pada Bagian Humas Dan Protokol Setda Kab. Manokwari (2003-2006)
6. Staf Subbag Kepegawaian pada Bagian Umum Setditjen BAKD Ditjen BAKD (2006)
7. Staf Seksi Wilayah III b Subdit Wilayah. III dit. Fas. Pertanggungjwban & Pengawasan Keuda (2007-2008)
8. Kasi Wilayah III b Pada Subdit Wilayah III dit Fas. Pertanggungjwbn & Pengawasan Keuangan Daerah Ditjen BAKD (2008-2010)
9. Kepala Seksi Wilayah II Pada Subdit Pembinaan Kinerja Dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Pelaksanaan & Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (2010-2012)
10. Kepala Bidang Prajabatan Dan Struktural Pada Pusat Diklat Struktural Dan Teknis Badan Pendidikan Dan Pelatihan (2012-2013)
11. Kepala Subdit Pinjaman Dan Obligasi Daerah Pada Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah & Investasi Daerah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (2013-2015)
12. Kepala Bagian Perencanaan Pada Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2015-2016)
13. Kepala Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah Pada Direktorat BUMD, BLUD, Dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2016-2017)
14. Kepala Bagian Keuangan Pada Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2017-2018)
15. Kepala Bagian Protokol Pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal (20182019)
16. Plt. Kepala biro administrasi pimpinan pada sekretariat jenderal (2019)
17. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pada Sekretariat Jenderal (2019)
18. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2020-2022)
19. Kepala Biro Keuangan Dan Aset Pada Sekretariat Jenderal (2022)

LAMPIRAN

Dapat diakses pada laman berikut:
https://tinyurl.com/EvidenceDraMarisiParulianMSi